LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2023

PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyusunan Laporan Lakip yang bersumber dari data dari berbagai kegiatan yang terhimpun dalam laporan akhir kegiatan dan merujuk kepada format penyusunan LKJIP, merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan kinerja dan pembangunan dan kegiatan rutin Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam yang merupakan penggabungan seluruh laporan dan sumber lainnya yang merupakan pelaksanaan kinerja OPD Tahun Anggaran 2023 sebagai wujud pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana yang tertuang dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 mencakup gambaran umum, pelaksanaan pembangunan, realisasi fisik dan keuangan, visi dan misi, strategi dan kebijakan, hasil yang dicapai, permasalahan dan pemecahannya, yang terpenting Analisis pencapaian dari perencanaan serta evaluasi dari tahun berjalan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan 2023 diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dan merupakan laporan tahun pertama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam yang mana dibentuk pada tahun 2023 . Pedoman atau acuan dalam penyusunan program; bahan untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam serta tugas urusan wajib pilihan serta pembantuan. Kebijakan dimasa mendatang sehingga pelaksanaan pembangunan dapat lebih ditingkatkan dan berkesinambungan. Semoga Laporan Tahunan ini dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Kritik dan saran yang membangun diharapkan demi kesempurnaan laporan ini.

Batam, Januari 2023
Dinas Ketahanan Pangan dan
PertanianKota Batam
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

MARDANIS, SE. MH
NIP. 19680714 198811 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 1

Daftar Isi i

Daftar Tabel iii

Daftar Lampiran v

Ikhtisar Eksekutif 2

BAB I PENDAHULUAN 6

1.1 Latar Belakang 6

1.2 Maksud, Tujuan dan Manfaat 7

1. Maksud 7
2. Tujuan 7
3. Manfaat 7

1.3 Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam 8

1. Stuktur Dinas 10
2. Sumber Daya Aparatur 11
3. Sarana dan Prasarana 12
4. Isu Stategi OPD Tahun 2023 15

1.4 Sistematika dan Kerangka Penyusunan LAKIP DKP2 2023..... 16

BAB II PERENCANAAN KINERJA 18

2.1 Perencanaan Strategis 18

1. Visi dan Misi 18
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 19
3. Indikator Kinerja Daerah (IKU RPJMD) Tahun 2023 21

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 22

BAB IIII AKUNTABILITAS KINERJA 26
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja 26
3.2 Pengukuran Kinerja Tahun 2023 28
1. Capaian Kinerja Daerah (Indikator Kinerja Utama RPJMD) Tahun 2023 28
2. Capaian Kinerja Renstra Dinas (Berdasarkan Tapkin 2023) 30
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023 32
3.4 Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2023 58
1. Pagu dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 58
2. Analisis Efisiensi dan Efektifitas Kegiatan 60
3. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan 2023 62

BAB IV TINDAK LANJUT LHE LAKIP 2023 65
BAB V PENUTUP 68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Susunan Data Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam 11

Tabel 1.2. Jumlah Kebutuhan Pegawai dan Aktual Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam 2023 12

Tabel 1.3 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain Kota Batam 13

Tabel 1.4 Daftar Barang Milik Negara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain Kota Batam 14

Tabel.2.1 Tujuan, Sasaran, Startegi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam 19

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKU RPMJD) yang menjadi Tanggung Jawab Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2023 21

Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanana Pangan dan Pertanian Kota Batam 2023 22

Tabel. 2.4 Target Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam 23

Tabel. 2.5 Program dan Kegiatan yang mendukung Target Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 24

Tabel. 3.1 Tabel Skala penilaian Peringkat Kinerja 27

Tabel 3.2. Pengukuran Indikator Kinerja Daerah (IKU RPMJD) yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2023 29

Tabel 3.3. Pengukuran Indikator Berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2023 31

Tabel 3.4. Tabel Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2017 Hingga Tahun 2023 36

Tabel 3.5. Situasi Konsumsi Pangan Penduduk Kota Batam Tahun 2023 (Total Wilayah) dengan AKE 2.150 kkal/kap/hari serta Konsumsi Pangan Sesuai Anjuran / PPH Ideal 37
Tabel 3.6. Situasi Konsumsi Pangan Penduduk Kota Batam Tahun 2023 (Total Wilayah)) dengan AKP 57 gram/kap ita kkal/kap/hari 38
Tabel 3.7. Pola Konsumsi Pangan Penduduk Kota Batam Tahun 2023 43
Tabel 3.8. Metode dan parameter pengujian sampel 47
Tabel 3.9 Produksi Pertanian Tahun 2021 dan 2023 49
Tabel 3.10 Uraian Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2023..... 58
Tabel.3.11 Rincian Realisasi Belanja pada Masing-Masing Jenis Belanja..... 59
Tabel. 3.12 Masukan, Keluaran dan Hasil Masing-masing kegiatan tahun 2023 60
Tabel.3.13 Realisasi Fisik Dan Keuangan Progam dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Batam 63

DAFTAR LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2023 (LKJIP DKP2 2023) merupakan LKJIP tahun Ketiga dari periode pelaksanaan Renstra Dinas Tahun 2021-2026. LKJIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2023 ini menyajikan perbandingan antara capaian kinerja (*Performance Results*) dengan rencana kinerja (*Performance Plan*) dan informasi akuntabilitas kinerja Dinas selama tahun 2023.

Kinerja yang dimaksud dalam LKJIP ini adalah *state of condition* dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan (tujuan, sasaran, hasil yang diinginkan, kondisi yang diinginkan dan perubahan yang diinginkan). Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam merupakan OPD yang bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan ke-3 dari misi ke-3 RPJMD Kota Batam 2021-2026 yaitu Mewujudkan **SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia.** Untuk mewujudkan amanah RPJMD tersebut, disusunlah visi Dinas 2021-2026

yaitu "**TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA** .

Indikator Kinerja dari sasaran **Meningkatnya sektor ketahanan pangan daerah** dari RPJMD Pemerintah Kota Batam yang menjadi tanggung jawab dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yaitu:

"Skor Pola Pangan Harapan (PPH)"

Skor PPH menggambarkan kinerja pemerintah dalam melakukan pembinaan dan edukasi perilaku konsumsi pangan masyarakat yang sesuai dengan standar gizi sehingga masyarakat Kota Batam dapat hidup lebih sehat, aktif dan produktif. Tingkat Pencapaian dari indikator meningkatnya skor pola pangan harapan dari target 87,6 **, realisasinya** 91.0 **dengan predikat capaian kinerja "SANGAT TINGGI"**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	87,6	**91.0**	**103.8**	Sangat Tinggi

Capaian kenerja Dinas Ketahanan pangan dan pertanian Kota Batam tahun 2023` dengan beberapa sasaran yaitu:

1. Terjaganya Keanekaragaman, Ketersediaan dan keamanan pangan**.**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
1.	Peningkatan Persentase Pangan Segar Aman Konsumsi	%	87	100	114.94	Sangat Tinggi
2.	Ketersediaan Pangan Utama (kg / kapita / tahun)	(kg / kapita / tahun)	152.40	154.52	101.39	Sangat Tinggi

Sasaran Terjaganya Keanekaragaman, Ketersediaan dan keamanan pangan pada tahun 2023 di nilai berhasil diwujukan pencapaian Predikat kinerja **"Sangat Tinggi"**

2. Meningkatnya Produksi hasil Pertanian dan Peternakan.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
1	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	%	4	3.08	95	Sangat Tinggi
2	Persentase peningkatan produksi ternak sapi	%	21	22	104.76	Sangat Tinggi

Sasaran Meningkatnya Produksi hasil Pertanian dan Peternakan pada tahun 2023 dinilai berhasil diwujudkan dari pencapaian 2 (dua) predikat kinerja "**Sangat Tinggi".**

3. Meningkatnya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan strategis dan penyakit zoonosis.**)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
1	Persentase hewan yang sehat dan produk asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (persentase hasil lab negative ditambah persentase lokus yang terealisasi dibagi dua)	%	85	85	100	Sangat Tinggi

Sasaran Meningkatnya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan strategis dan penyakit zoonosis. pada tahun 2023 dinilai berhasil diwujudkan dari pencapaian predikat kinerja "**Sangat Tinggi"**

Hasil Pengukuran kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terhadap 3 (tiga) sasaran Strategis yang di uraikan dalam 5 (Lima) indikator Dinas 2021-2026 yang tercantum dalam dokumen Penentapan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam tahun 2023 diperoleh kesimpulan:

Sasaran strategis Renstra dengan capaian kinerja berpredikat "**Sangat Tinggi**" Terdiri dari indikator Peningkatan Persentase Pangan Segar Aman Konsumsi, Ketersediaan Pangan Utama (kg / kapita / tahun), Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (komoditas palawija dan hortikultura), Persentase peningkatan produksi ternak sapi, Persentase hewan yang sehat dan produk asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (persentase hasil lab negative ditambah persentase lokus yang terealisasi dibagi dua.

Dalam rangka merealisasikan tujuan dan sasaran strategis Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2021-2026, maka tahun 2023 dilaksanakan **7 *(Tujuh) Program 9 Kegiatan*** yang tertuang dalam DPA-SKPD tahun 2023

DPA-SKPD tahun 2023 yang mencakup indikator kinerja *input, output, outcome*, diperoleh kesimpulan bahwa secara keseluruan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam sudah berjalan dengan baik yang secara umum mengalami Rasionisasi karena dari total 9 Kegiatan APBD/APBD-P Tahun 2023 yang dilaksanakan berkategori Efisien dan Efektif.

Pagu anggaran dan realisasi APBD untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun Anggaran 2023 disajikan pada Belanja Operasi yang ditetapkan sebesar **Rp 13,218,176,672.00** realisasinya sebesar Rp **12,340,548,939.00** atau pesentase realisasi belanjanya **93.36 % dan** Belanja Modal yang ditetapkan sebesar **Rp 545,927,700.00** realisasinya sebesar **Rp 542,215,000.00** atau pesentase realisasi belanjanya **99.32 %** Sedangkan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang ditetapkan sebesar Rp **7,799,392,592.00** jumlah realisasinya Rp **7,590,991,577.00** pesentase realisasi belanjanya **97.33 %**. Dengan rincian realisasi per jenis belanjanya sebagaimana tabel berikut.Berdasarkan hasil analisis atas pencapaian kinerja tahun 2023, terdapat beberapa rumusan langkah strategis yang akan dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

1) Melembagakan fakta integritas dan pernyataan Kontrak Kinerja Pada semua aparatur secara berjenjang;
2) Meningkatkan konsistensi, harmonisasi dan sinergitas perencanaan kinerja antara dokumen Renstra, Renja, Tapkin, dan RKA-DPA OPD yang mencerminkan kesungguhan dalam mewujudkan IKU (Key Performance Indikator);
3) Meningkatkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan menerapkan prinsip *money follows function and no performance, no money;*
4) Mengembangkan sistem kehumasan, publikasi dan promosi agribisnis dan ketahanan pangan berbasis teknologi informasi;
5) Meningkatkan kualitas pelayanan berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
6) Meningkatkan efisien dan efektifitas pemanfaatan sumber daya dan sumber dana dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra maupun Renja
7) Meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur Dinas secara berkelanjutan sesuai tuntutan tupoksi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Berkomitmen kuat dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government).* Karakteristik atau unsur utama penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), keterbukaan (*openes*) dan kerangka hukum (*rule of law*).

Akuntabilitas publik merupakan landasan utama bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Ini diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya. Akuntabilitas juga merupakan prasyarat mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan yang dapat diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran dan hasil yang sebesar mungkin. asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (rakyat) sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah berupa suatu laporan yang kemudian diberi nama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKJIP).

Dalam melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah

kegiatan selesai dan berfungsi. Berpijak pada konsep tersebut, maka indikator kinerja tidak saja dari aspek inputs, outputs, tapi juga sampai pada out comes, benefits dan impact dari kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Pada gilirannya semua proses yang dilaksanakan untuk dinikmati masyarakat.

1.2 Maksud, Tujuan, dan Manfaat

1. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKJIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2023 adalah sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi pokok yang diamanatkan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam atas penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya dalam rangka pencapaian target kinerja yang sudah diperjanjikan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan LAKJIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 adalah

a. Memberikan informasi kinerja yang terukur, akurat dan obyektif kepada pemberi mandat atas capaian kinerja yang telah dan seharusnya dicapai pada tahun 2023, baik yang bersifat keberhasilan maupun kegagalan.
b. Meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas instansi serta meningkatkan pula kepercayaan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah.
c. Sebagai bahan evaluasi dan bahan perbaikan secara berkesinambungan bagi Dinas untuk meningkatkan kinerja pada periode yang akan datang.

3. Manfaat

Manfaat penyusunan LAKJIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2) Bahan masukan bagi penyempurnaan dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja pada periode yang akan datang;
3) Bahan penyempurnaan pengelolaan program dan kegiatan pada periode berikutnya;

1.3 Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susuanan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam dan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kota Batam. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam mempunyai kedudukan, yaitu: (1) Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai lingkup tugas dan fungsinya; (2) Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Daerah.

Uraian tugas masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1) **Kepala Dinas** bertugas memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas serta membantu walikota dalam bidang teknis, mempunyai fungsi :
   - Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan, kelembagaan dan penyuluhan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan.
   - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketahanan pangan, kelembagaan dan penyuluhan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan.
   - Pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketahanan pangan, kelembagaan dan penyuluhan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan; dan.
   - Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dinas.

2) **Sekretaris** yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan asset serta pengkoordinasian tugas-tugas dan Sekretariat di bantu Sub Bagian Perencanaan Program, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3) **Kepala Bidang Ketahanan Pangan** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Ketahanan Pangan. Dalam pelaksanaan tugas pokok, dalam menjalankan fungsi dan uraian tugas kepala bidang dibantu oleh Kasi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, kasi Distribusi dan Cadangan Pangan dan kasi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

4) **Kepala Bidang Pertanian** bertugas membantu kepala dinas dalam lingkup Bidang Pertanian, dalam menjalankan fungsi dan uraian tugas, Kepala Bidang dibantu oleh Kasi Sarana dan Prasarana Pertanian, Kasi Pengembangan Tanaman Pangan dan Kasi Hortikultura dan Perlindungan Tanaman dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

5) **Kepala Bidang Kelembagaan dan Penyuluh** bertugas membantu kepala dinas dalam lingkup Bidang Kelembagaan dan Penyuluh, dalam menjalankan fungsi dan uraian tugas, Kepala Bidang dibantu oleh Kasi Pengembangan dan Kelembagaan Penyuluh, Kasi Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Petani dan Peternak, dan Kasi Programa Penyuluhan.

6) **Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan** bertugas membantu kepala dinas dalam lingkup Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam menjalankan fungsi dan uraian tugas kepala bidang dibantu oleh Kasi Perbibitan dan Produksi Ternak, Kasi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

1. Struktur Dinas

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam memiliki Peraturan Walikota Batam Nomor : 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam;

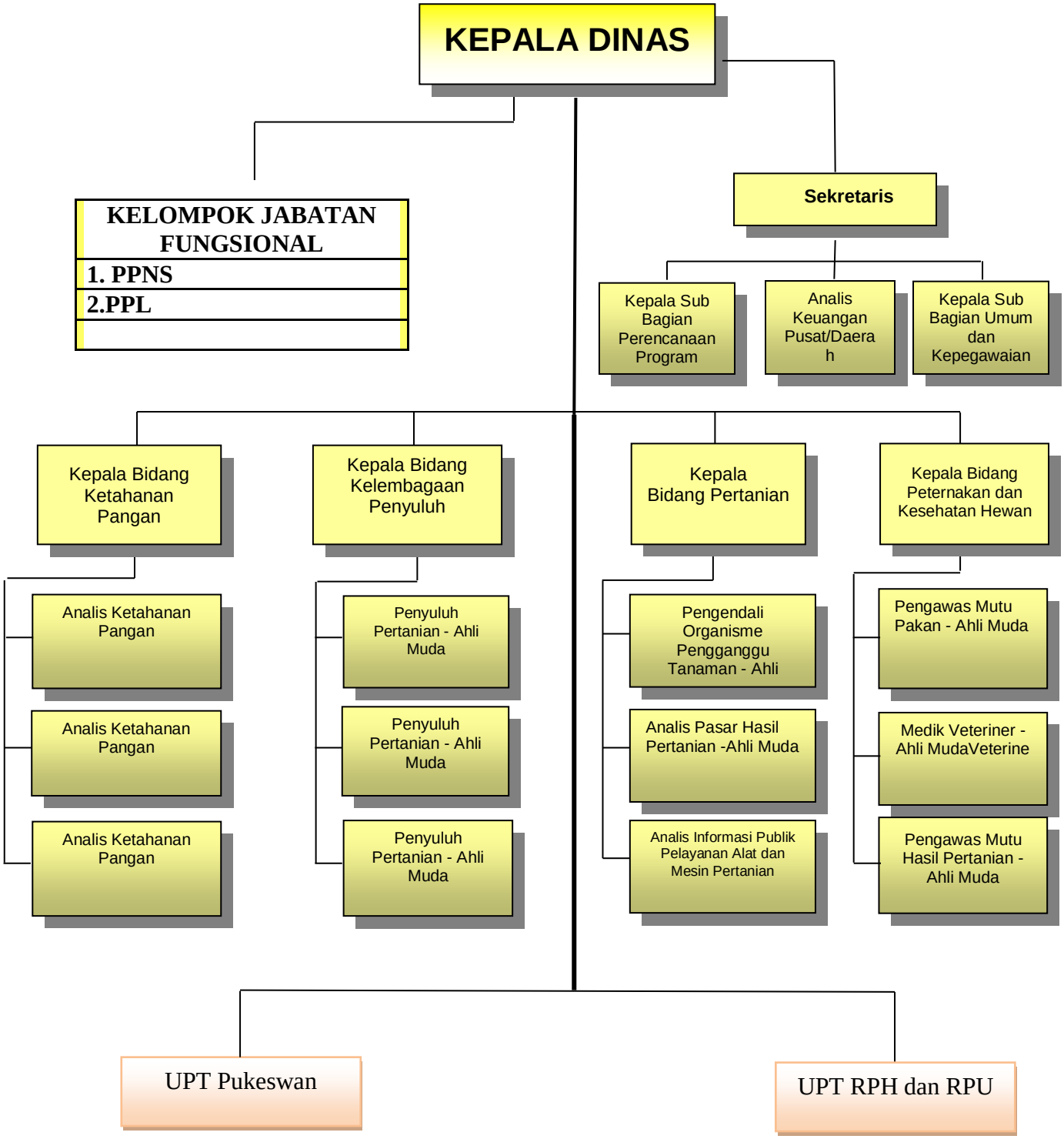

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

2. Sumber Daya Aparatur

Susunan Data Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1. Susunan Data Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

Pangkat/Gol		Eselon		Pendidikan		Diklat Penjenjangan		Agama		Jenis Kepegawaian	
Pembina utama muda (IV/c)	1	II b	1	S2	12	Diklat PIM II	1	Islam	39	Struktural	11
Pembina Tk. I (IV/b)	1	III a	1	S1	20	Diklat PIM VI	2	Kristen	6	Fungsional	23
Pembina (IV/a)	9	III b	4	D3	6	Diklat PIM IV	9			Pelaksana	11
Penata Tk. I (III/d)	12	IVa	3	SMA	7						
Penata (III/c)	5	IVb	2								
Penata Muda Tk. I (III/b)	3										
Penata Muda (III/a)	1										
Pengatur Tk. I (II/d)	1										
Pengatur (II/c)	1										
Pengatur Muda Tk. I (II/b)											
Pengatur Muda (II/a)	1										
Golongan X	1										
Golongan IX	5										
Golongan VIII	1										
Golongan V	3										

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

Sumberdaya manusia menjadi unsur penting dalam organisasi. Sebagai pemeran utama dalam menjalankan tugas pokok organisasi dan roda organisasi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat melibatkan sumber daya manusia yang ada, dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda satu dengan lainnya, namun demikian diharapkan tetap dapat menjalankan

tugas dan fungsi masing-masing guna mensinergikan tujuan yang hendak dicapai. Analisa kebutuhan dan aktual pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian Kota Batam PNS sebanyak 34 Orang dan Pegawai Pemerintah Perjanjian kerja sebanyak 4 Orang Total Pegawai sebanyak 38 sedangkan kebutuhan sebanyak 97 rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2. Jumlah kebutuhan pegawai dan aktual Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2023

Jabatan	Kebutuhan	Aktual
Eselon II	1	1
Eselon III	5	3
Eselon IV	19	19
Pelaksanan	46	9
Fungsional	26	6
Total	**97**	**38**

Dari data diatas dapat kita tarik kesimpulan pegawai di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam tidak sesuai dengan kebutuhan karena kekurangan pegawai 59 orang.

3. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas memerlukan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana yang dari segi kualitas dan kuantitas harus memadai. Jenis dan

jumlah sarana dan prasarana yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dapat dilihat pada Tabel dibawah ini ;

Tabel 1.3 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain Kota Batam

No Urut	**Jenis Barang / Nama Barang**	**Letak/Alamat**	**Harga**	**Ket**
1	2	3	4	5
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jln. Raja Haji No. 3 Sekupang	1,009,015,867	
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Ex Kantor Dinas Kehutanan, kel. tanjung sari, kec. Belakang Padang,	25,674,300	
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jln. Raja Haji No. 3 Sekupang	143,000,000	
4	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	P Buluh	60,000,000	
5	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	P. Buluh	2,000,000	
6	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	Sembulang	15,000,000	
7	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	P Buluh	950,000,000	
Jumlah			**2,204,690,167**	

Tabel 1.4 Daftar Barang Milik Negara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain Kota Batam

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5
1	Motor	Unit	15	
2	Global Positioning System (GPS)	Unit	3	
3	Termometer Standard	Unit	6	
4	Timbangan Meja Capasitas 10 Kg	Unit	1	
5	Timbangan Digital	Unit	3	
6	Rak Buku	Unit	6	
7	Mesin FotoCopy	Unit	1	
8	Lemari Besi/Metal	Unit	6	
9	Filling Besi/Metal	Unit	7	
10	Brand Kas	Unit	1	
11	Alat Penghancur Kertas	Unit	1	
12	Papan Nama Instansi	Buah	1	
13	Mesin Absensi	Unit	1	
14	Papan pengumuman	Buah	1	
15	Papan nama Lokasi	Buah	1	
16	Lemari Kayu	Unit	5	
17	Meja Rapat	Unit	1	
18	Meja Komputer	Unit	1	
19	Sofa	Set	6	
20	Mesin Potong Rumput	Unit	1	
21	Lemari Es	Unit	1	
22	AC Split	Unit	23	
23	Sound System	Unit	3	
24	Megaphone	Unit	1	
25	Printer	Unit	26	
26	Jumlah Komputer	Unit	21	
27	Pendingin Ruangan (AC)	Unit	24	
28	Laptop	Unit	14	
29	Scanner	Unit	3	
30	Meja	Unit	46	
31	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Unit	10	
32	Proyektor + Attachment	Unit	1	
33	Alat-alat Kedokteran Hewan	Unit	2	
34	Alat Uji Laboratorium Jalan	Unit	8	
35	PH Meter	Unit	3	
36	Mesin Genset	Unit	5	
37	Tractor Lain-lain	Unit	1	

4. Isu Strategis OPD Tahun 2023

Permasalahan utama yang harus menjadi fokus kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan pembangunan sektor Ketahanan Pangan dan pertanian di 2023 sebagai berikut:

- Program ketahanan pangan nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang belum terintegrasi dengan baik.
- Belum terbentuknya Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah koordinasi OPD dalam penyelenggaraan ketahanan pangan.
- Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi pangan yang menghambat akses fisik dan memicu kenaikan harga.
- Ketersediaan Pangan , antar waktu dan antar wilayah tidak merata.
- Sistem cadangan dan distribusi serta rantai pasokan dan logistik nasional yang belum efisien,
- Belum optimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA).
- Masih beredarnya produk pangan yang tidak aman untuk dikonsumsi.
- Hasil produksi pangan belum sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk
- Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani kegiatan ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi penganekaragaman pangan dan keamanan pangan
- Ketidakpastian status lahan yang dikelola terutama di kawasan Bonded Area.
- Rendahnya kualitas produksi yang dihasilkan karena teknologi, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil masih belum optimal.
- Sebagai penyangga ketahanan pangan Kota Batam, status lahan yang belum jelas untuk pengembangan budidaya pertanian / peternakan sangat berpengaruh terhadap penataan usaha pertanian / peternakan.
- Belum maksimalnya pelayanan dan pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN), Rumah Potong Unggas (RPU) dan Rumah Potong Hewan (RPH).
- Belum maksimalnya pengawasan Pertanian dan Peternakan
- Masih kurangnya SDM petugas Pertanian dan Peternakan.
- Masih kurangnya pemanfaatan pulau-pulau / wilayah pesisir Kota Batam sebagai diversifikasi usaha peternakan
- Kurangnya SDM Penyuluh lapangan untuk pertanian dan peternakan

- Terbatasnya sarana pendukung sistem penyuluhan,
- Keterbatasan pengetahuan dan penguasaan teknologi oleh petani
- Rendahnya pengetahuan/ pemahaman petani dan peternak tentang budidaya tanaman
- Lambatnya dalam pendistribusian pupuk ke lokasi sentra produksi

1.4 Sistematika dan Kerangka Penyusunan LAKIP DKPP 2023

Penyusunan LAKIP DKPP Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyajian LAKIP DKPP 2023 sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF, pada bagian ini berisi ringkasan secara menyeluruh LAKIP DKPP 2023;

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini berisi latar belakang, maksud, tujuan dan manfaat, gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ; Isu strategis OPD Tahun 2023, dan Sistematika dan Kerangka Penyusunan LAKIP DKPP 2023;

BAB II PERENCANAAN KINERJA, pada bab ini berisi perencanaan strategis DKPP Tahun 2021-2026 dan penetapan kinerja tahun 2023;

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, pada bab ini disajikan tentang Kerangka pengukuran kinerja, Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023 dan Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2023;

BAB IV TINDAK LANJUT LHE LAKJIP TAHUN 2023 pada bab ini disajikan Rekomendasi dan tindaklanjut pada LAJIP 2023

BAB V PENUTUP, pada bagian ini akan dilampirkan beberapa dokumen penting yaitu Perjanjian Kinerja dan lain-lain yang dianggap penting serta perlu.

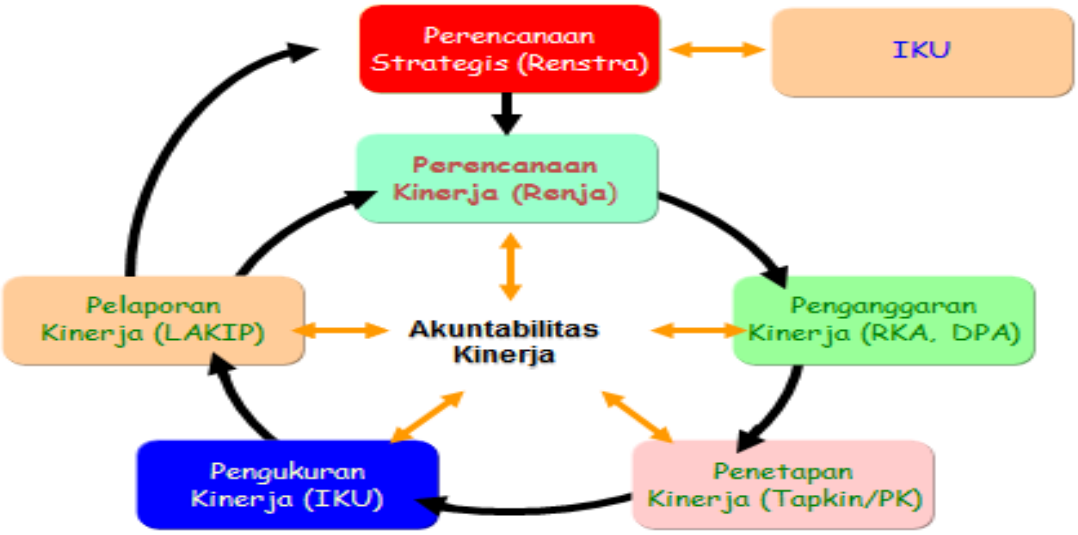

Gambar 1.2. Siklus Akuntabilitas Kinerja DKP2

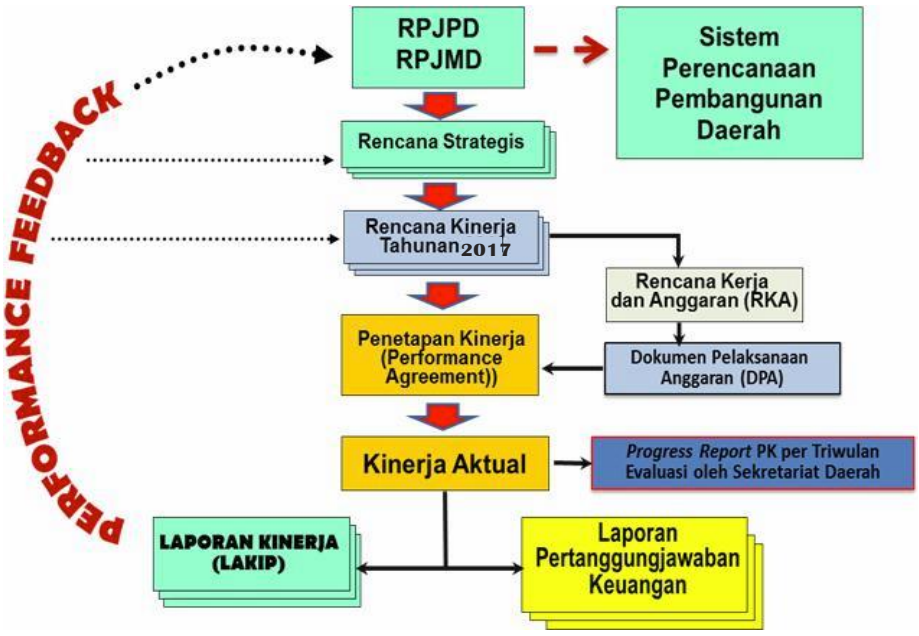

Gambar 1.3. Keterkaitan RPJMD, RKPD, Renstra, Renja dan IKU DKP2 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis itu sendiri adalah proses penentuan strategi atau arahan sekaligus pengambilan keputusan dalam alokasi sumberdaya. Pendekatan strategis memfokuskan secara efisien pada tujuan yang spesifik. Langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan aktual/kekinian dari masyarakat sasarannya, yang diselaraskan dengan visi dan misi organisasi serta mempertahankan faktor kekuatan, tantangan, hambatan, serta peluang yang membentang di depan. Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen Perencanaan Strategis tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanaan Pangan dan Pertanian Kota Batam Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026

Tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 dan pelaksanaan Renstra DKPP Tahun 2021-2026.

1. Visi dan Misi

Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021 – 2026 adalah " **"TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA"".** Misi untuk mewujudkan visi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.
2) Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang
3) Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia
4) Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam
5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berpedoman pada ruang lingkup kewenangan, tugas pokok dan fungsi SKPD, memperhatikan potensi berbagai sumber daya yang tersedia dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta mengacu pada Visi dan Misi RPJMD Kota Batam Tahun 2021–2026.

2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tabel. 2.1 Tujuan, Sasaran, Startegi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas ketahanan pangan masyarakat dan kesehatan masyarakat veteriner Kota Batam	Terjaganya Keanekaragaman, Ketersediaan dan keamanan pangan	Peningkatan Persentase Pangan Segar Aman Konsumsi	1. Meningkatkan pola konsumsi pangan, beragam, bergizi, berimbang dan aman

			Ketersediaan Pangan Utama (kg / kapita / tahun)	2. Mengembangkan sistem agribisnis yang berdaya saing
		Meningkatnya Produksi hasil Pertanian dan Peternakan	Persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	3. Mendorong masyarakat untuk menghasilkan produk pertanian yang memiliki nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi melalui urban farming. 4. Memfasilitasi promosi pemasaran, produk pertanian dan hasil olahannya 5. Meningkatkan pemeriksaan mutu komoditas hasil pertanian dan peternakan yang beredar di Kota Batam
			Persentase peningkatan produksi ternak sapi	6. Meningkatkan pemeriksaan mutu komoditas hasil pertanian dan peternakan yang beredar di Kota Batam

		Meningkatnya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan strategis dan penyakit zoonosis.	Persentase hewan yang sehat dan produk asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (persentase hasil lab negative ditambah persentase lokus yang terealisasi dibagi dua)	Meningkatkan pengawasan, pencegahan dan pengendalian penyakit hewan, khususnya penyakit hewan strategis dan penyakit zoonosis serta meningkatkan pelayanan kesehatan hewan, pemeriksaan dan pengujian laboratorium kesehatan hewan.

1. Indikator Kinerja Daerah (IKU RPJMD) Tahun 2023

Indikator Kinerja Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2023 diuraikan dalam Tabel 2.2

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKU RPMJD) yang menjadi Tanggung Jawab Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD	Penjelasan Perhitungan	Satuan	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 3: Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia				
Tujuan : Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertaqwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera				
Sasaran: Meningkatnya sektor ketahanan pangan daerah				
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100	**Skor**	**87,6**

Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanana Pangan dan Pertanian Kota Batam 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun 2023
1	2	3	4	5
1	Terjaganya Keanekaragaman, Ketersediaan dan keamanan pangan	Peningkatan Persentase Pangan Segar Aman Konsumsi	%	87
		Ketersediaan Pangan Utama (kg / kapita / tahun)	(kg / kapita / tahun)	152.40
2	Meningkatnya Produksi hasil Pertanian dan Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	%	4
		Persentase peningkatan produksi ternak sapi	%	21
3.	Meningkatnya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan strategis dan penyakit zoonosis.	Persentase hewan yang sehat dan produk asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (persentase hasil lab negative ditambah persentase lokus yang terealisasi dibagi dua)	%	85

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja (sebelumnya disebut sebagai Penetapan Kinerja) adalah Perjanjian Kinerja (sebelumnya disebut sebagai Penetapan Kinerja) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota Batam Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam untuk melaksanakan program dan kegiatan disertai dengan target indiaktor kinerja. Dengan Perjanjian Kinerja ini diharapkan terwujud komitmen penerima amanah (Kepala Dinas) dan kesepakatan antara pemberi amanah (Walikota) dan penerima amanah (Kepala Dinas) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja atau Tapkin 2023 secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 1.**

Pada tahun 2023, di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam mulai diterapkan Cascading Perjanjian Kinerja yang berlakukan bagi seluruh Eselon II, III dan IV. Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi diwajibkan menandatangani Pernyataan Kontrak Kinerja berdasarkan Cascading Perjanjian Kinerja. Pernyataan Kontrak Kinerja tersebut dievaluasi secara periodik setiap Triwulan oleh Kepala Dinas. Substansi yang diperjanjikan adalah IKU Renstra beserta target kinerjanya serta tolok ukur indikator kinerja kegiatan (Input, Output, dan Outcome) sesuai dokumen DPA-SKPD yang menjadi tanggung jawab masing-masing Pimpinan Unit Kerja.

Laporan hasil evaluasi Cascading Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Batam Tahun 2023 dibuat dalam bentuk dokumen tersendiri.

Secara ringkas uraian tujuan, sasaran, indikator kinerja utama dan target yang sudah ditetapkan dalam **Tapkin 2023** (**Perjanjian Kinerja 2023**) sebagai berikut :

Tabel. 2.4 Target Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4
Terjaganya Keanekaragaman, Ketersediaan dan keamanan pangan	Peningkatan Persentase Pangan Segar Aman Konsumsi	%	87
	Ketersediaan Pangan Utama (kg / kapita / tahun)	(kg / kapita / tahun)	152.40
Meningkatnya Produksi hasil Pertanian dan Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	%	4
	Persentase peningkatan produksi ternak sapi	%	21
Meningkatnya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan strategis dan penyakit zoonosis.	Persentase hewan yang sehat dan produk asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (persentase hasil lab negative ditambah persentase lokus yang terealisasi dibagi dua)	%	85
Meningkatnya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	%	100

Pelaksanaan dan hasil /realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut akan dimonitoring setiap triwulanan, kemudian dilaporkan menjadi laporan interin (triwulanan) dan pada akhir tahun dilaporkan menjadi laporan kinerja.

Keberhasilan pencapaian target sangat didukung oleh penganggaran yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam. Dukungan tersebut ditetapkan dalam 6 (Enam) Program utama, yaitu

Tabel. 2.5 Program dan Kegiatan yang mendukung Target Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023

No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan	
1	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	1	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN)
		2	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN)
2	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	3	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN)
3	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	4	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	4	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN)
4	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN**	5	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	5	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

	SARANA PERTANIAN				(DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN)
5	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	6	Pembangunan Prasarana Pertanian	6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN)
6	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	7	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	7	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN)
		8	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	8	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN)
				9	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN)
7	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	9	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	10	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN)
				11	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam selaku pengemban amanah masyarakat di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kelembagaan dan Penyuluhan melaksanakan kewajibannya untuk menginformasikan tingkat akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai mendorong terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam tahun 2023 diukur berdasarkan tingkat capaian target indikator kinerja utama (IKU) sasaran strategis SKPD yang tertuang dalam dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja (PK) dan capaian target indikator kinerja utama (IKU) RPJMD Kota Batam.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Indikator kinerja program (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama dari pada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome program tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator

outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara realisasi indikator kinerja dengan target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk mempermudah interprestasi atas tingkat pencapaian indikator kinerja, digunakan dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel. 3.1 Tabel Skala penilaian Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Kode Predikat Kinerja
1	2	3	4
1.	≥91%	Sangat tinggi	
2.	76% - 90%	Tinggi	
3.	66% - 75%	Sedang	
4.	51% - 65%	Rendah	
5.	≤ 50%	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri No. 27 Tahun 2014

Makna kriteria penilaian capaian kinerja sebagai berikut:

(1) **Sangat Tinggi dan Tinggi**

Menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) **Sedang**

Menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) **Rendah dan Sangat Rendah**

Menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.2. Pengukuran Kinerja Tahun 2023

1. Capaian Kinerja Daerah (Indikator Kinerja Utama RPJMD) Tahun 2023

Hasil pengukuran Indikator Kinerja Daerah atau IKU RPJMD Kota Batam Tahun 2023 yang menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dijelaskan pada Tabel 3.2.

Dari hasil analisis terhadap Indikator Kinerja Daerah (IKU) RPMJD Kota Batam Tahun 2023 yang menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam bahwa Indikator Kinerja dengan predikat capaian berklasifikasi **"SANGAT TINGGI.**

Tabel 3.2.
Pengukuran Indikator Kinerja Daerah (IKU RPMJD)
yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Batam Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD	Penjelasan Perhitungan	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Predikat Kinerja 2023	Kode Predikat Kinerja 2023	Target Akhir RPJMD 2026	% Capaian Target Akhir RPJMD 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7= *6/5*)	(8)	(9)	(10)	(11=6/10)
Sasaran *RPJMD* : Meningkatnya sektor ketahanan pangan daerah										
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100.	**Skor**	87.6	**91.0**	**103.8**	Sangat Tinggi		88,5	**91.0**

2. Capaian Kinerja Dinas (Berdasarkan Tapkin 2023)

Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan pengukuran kinerja Tahun 2023 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023.

Tabel 3.3.
Pengukuran Indikator Berdasarkan Dokumen
Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja (%)	Predikat Kinerja	Kode Predikat Kinerja	Penanggung Jawab Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terjaganya Keanekaragaman, Ketersediaan dan keamanan pangan	Peningkatan Persentase Pangan Segar Aman Konsumsi	%	87	100	114.94	Sangat Tinggi		Bidang Ketahanan Pangan
	Ketersediaan Pangan Utama (kg / kapita / tahun)	(kg / kapita / tahun)	152.40	154.52	101.39	Sangat Tinggi		Bidang Ketahanan Pangan
Meningkatnya Produksi hasil Pertanian dan Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	%	4	3.8	95	Sangat Tinggi		Bidang Pertanian
	Persentase peningkatan produksi ternak sapi	%	21	22	104.76	Sangat Tinggi		Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Meningkatnya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan strategis dan penyakit zoonosis.	Persentase hewan yang sehat dan produk asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (persentase hasil lab negative ditambah persentase lokus yang terealisasi dibagi dua)	%	85	85	100	Sangat Tinggi		Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Meningkatnya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100	Sangat Tinggi		Sekretariat

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Batam Tahun 2023 secara umum dinilai telah berhasil mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja 2023 dan Tapkin 2023

Penilaian ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja yang disajikan pada Tabel 3.3. Dari hasil analisis, diketahui bahwa dari 4 sasaran strategis dan Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Tapkin 2023, sebanyak 6. Sasaran strategis dengan capaian kinerjanya ≥91% atau capaian kinerja berpredikat **SANGAT TINGGI** Sedangkan Jumlah.

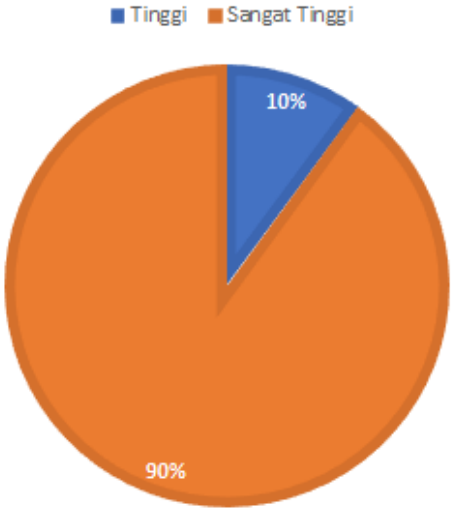

Gambar 3.1 Komposisi Capaian Kinerja per Jenis Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

Sasaran *RPJMD* : Meningkatnya sektor ketahanan pangan daerah

Sasaran strategis pertama, tingkat capaiannya diklasifikasikan **SANGAT TINGGI** dan dinilai berhasil. Pengukuran kinerja sasaran strategis pertama didasarkan pada pencapaian dari 1. (Tida) indikator kinerja utama (IKU) yaitu

1. **Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**

IKU skor PPH merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan Pemerintah Kota Batam melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah upaya memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Pola konsumsi pangan adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan.

Pentingnya pencapaian skor PPH tersebut juga diamanatkan oleh Undang – Undang (UU) Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Pasal 60 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif dan produktif dan ayat (2) Penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Pasal 62 tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang ketahanan

pangan dan gizi Pasal 25 menyatakan Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya lokal. Peraturan Presiden Nomor. 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, pasal 3 menyatakan Fungsi Badan Pangan Nasional adalah pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan serta Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 11 tahun 2023 tentang Pola Pangan Harapan Pasal 2 menyatakan perbadan ini digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk penilaian jumlah dan komposisi pangan berdasarkan PPH. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan daerah untuk pencapaian target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi baik provinsi maupun kabupaten/kota., skor PPH merupakan bagian dari sistem informasi pangan dan gizi yang penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pola Pangan ditetapkan tanggal 12 Mei 2023 diundangkan pada tanggal 15 Mei 2023 merupakan pedoman untuk penilaian jumlah dan komposisi pangan berdasarkan PPH, bahwa penetapan target skor PPH Kabupaten/Kota mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan target skor PPH Nasional dan usulan Kepala Badan. Penilaian Skor PPH tingkat Nasional, Provinsi dan kabupaten/Kota dilakukukan setiap tahun berjalan. Kegunaan Skor PPH antara lain (1). Evaluasi situasi dan kebijakan konsumsi pangan; (2). Perencanaan konsumsi, penyediaan dan produksi pangan dan (3). Penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan bidang pangan.

Perhitungan Pola Pangan Harapan menggunakan data SUSENAS (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistikdi seluruh kabupaten/kota. Susenas mengumpulkan berbagai informasi keterangan pendidikan, kesehatan, perumahan, sosial budaya, ketenagakerjaan, akses terhadap makanan, pengeluaran dan konsumsi rumah tangga dan lain-lain. Pemanfaatan data Susenas antara lain sebagai (1). Perencanaan dan evaluasi program pembangunan nasional, (2). Perencanaan dan evaluasi program sektoral, (3). Penyediaan indikator SDGs dan RPJM dan (4). Penyediaan data bagi UN Agency, LSM, perusahaan, akademisi dan pengguna data lainnya. Pengumpulan data Susenas dilakukukan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu bulan Maret dan September. Level penyajian data dibagi menjadi 2(dua) yaitu untuk

Susenas bulan Maret sampai dengan level Kabupaten/Kota sedangkan Susenas bulan September disajikan hingga level Provinsi. Analisis data konsumsi pangan hasil Susenas menggunakan Aplikasi Harmonisasi Analisis Pola Pangan Harapan Berdasarkan Data Susenas hasil kerjasama Badan Pangan Nasional dengan Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Dasar pertimbangan Harmonisasi, Mengingat data konsumsi pangan berdasarkan data Susenas merupakan data statistik pembangunan maka pengelolaanya hanya dapat dilakukan oleh Badan Pusat Statistik sesuai dengan amanat UU Statistik No 16 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 199 /1999 tentang Pengelolaan Statistik di Indonesia. Namun demikian, upaya harmonisasi analisis Pola Pangan Harapan konsumsi pangan berdasarkan data Susenas perlu dilakukan antara lain melalui teknik justifikasi pada parameter dan standar perhitungan skor Pola Pangan Harapan. Harmonisasi perhitungan dan analisis Pola Pangan Harapan menjadi sangat relevan apabila hasil analisis akan digunakan untuk penetapan sasaran dan penilaian kinerja pembangunan ketahanan pangan, khususnya terkait indikator kinerja konsumsi pangan penduduk.

Terkait dengan analisis situasi konsumsi pangan penduduk berdasarkan data SUSENAS, secara metodologis terdapat dua hal yang dapat kecenderungan yang dapat mempengaruhi hasil analisis, yaitu :

- Metode ”recall” seminggu berpotensi terjadinya under/over estimate data konsumsi data konsumsi pangan yang diingat oleh responden;
- Ketersediaan jenis makanan jadi dan makanan yang dikonsumsi di luar rumah yang terdapat dalam kuesioner Susenas.

Salah satu indikator untuk mengetahui pencapaian konsumsi pangan secara kualitatif adalah melalui pencapaian skor PPH, konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan pencapaian skor PPH 100. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2018 yang diselenggarakan tanggal 3-4 Juli 2018, di Birawa Assembly Hall, Hotel Bumi Karsa, Bidakara, Jakarta. Diharapkan 800 peserta hadir mulai dari pemerintah, Industri, Akademisi, Swasta, Universitas, Lembaga Riset, Pemda, WHO, FAO, UNICEF,UNDP dan NGOs yaitu merekomendasikanbahwa Anhka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2100 kkal/kapita/hari dan Angka Kecukupan Protein (AKP) 57 gram/kapita/hari. pencapaian target skor PPH sebesar 95.2 menjadi target capaian

tahun 2024 sesuai Perpres 18 tahun 2020 tentang RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024. Sedangkan capaian keberhasilan Skor PPH Konsumsi tahun 2023 yaitu 91.0 atau 92,35% dari target yang ditetapkan yaitu 94.1

Secara kuantitas konsumsi pangan penduduk pada tahun 2023 di tingkat rumah tangga (menurut SUSENAS tahun 2023) dengan aplikasi yaitu Analisis Pola Pangan Harapan Berdasarkan data SUSENAS kerjasama Badan Pangan Nasional dengan IPB University, dengan menggunakan AKE 2100 Kkal/Kap/hari. Kualitas konsumsi pangan penduduk berdasarkan nilai skor PPH pada tahun 2023 sebesar 91.0

Tabel 3.4 Tabel Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2017 Hingga Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Score Pola Harapan	%	86.5	91.3	92.1	92.20	89.9	91.5	91.0

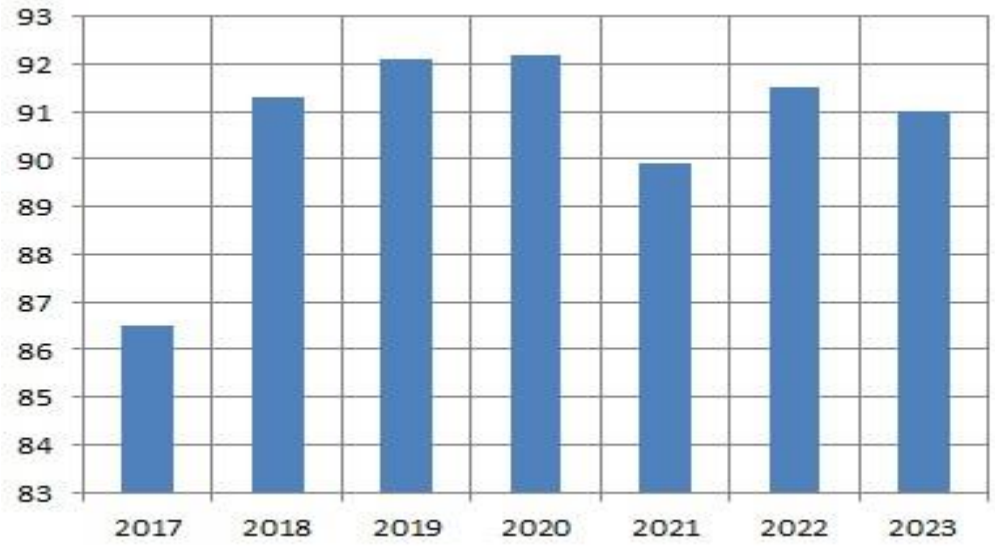

Gambar 3.1 Grafik Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2017 s.d 2023

Berdasarkan Hasil Analisis Pola Pangan Harapan pada Tahun 2023, kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Batam yang ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan, sudah cukup baik meskipun belum mencapai kondisi ideal. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Batam mengalami kenaikan dalam empat tahun. Pada tahun 2017 (Menggunakan data

Susenas 2017) sebesar 86., tahun 2018 (Menggunakan data Susenas 2018) sebesar 91.3 dan sasaran tahun 2019 (Menggunakan data Susenas 2018) sebesar 92.1, tahun 2020 (Menggunakan data Susenas 2019) sebesar 92.2 , tetapi pada tahun 2021 (Menggunakan data Susenas 2020) mengalami penurunan sebesar 89.9 dan meningkat lagi di tahun 2022 sebesar 91.5 (data Susenas 2022 dan tahun 2023 (Data Susenas 2023 sebesar 91.0. Konsumsi Protein Per hari masyarakat Kota Batam tahun 2019 sebesar 69.27 Gram/Kapita dan pada tahun 2020 sebesar 74.74 Gram/Kapita pada tahun 2021 sebesar 73.1 Gram/Kapita pada tahun 2022 sebesar 67.7 Gram/Kapita. Walaupun mengalami penurunan dari tahun lalu secara agregat konsumsi protein masyarakat Kota Batam telah memenuhi Angka Kecukupan Protein (AKP) yang direkomendasikan WNPG X Tahun 2012 sebesar 57 gram/kapita/hari

Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan konsumsi energi dari tahun 2017 sebesar 2.125,1 kkal/kapita/hari menjadi 2.398,5 kkal/kapita/hari tahun 2018 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 2.376,1 kkal/kap/hari sedangkan tahun 2020 sebesar 2.433 kkal/kap/hari tahun 2021 sebesar 2.211 tahun dan 2023 sebesar 2.105 atau 100.3% AKE.

Tabel 3.5. . Situasi Konsumsi Pangan Penduduk Kota Batam Tahun 2023 (Total Wilayah) dengan AKE 2.100 kkal/kap/hari serta Konsumsi Pangan Sesuai Anjuran / PPH Ideal

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal /Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	265,2	1.033	50,5	49,2	0,5	25,2	24,6	25,0	24,6
2	Umbi-umbian	36,9	37	1,8	1,8	0,5	0,9	0,9	2,5	0,9
3	Pangan Hewani	177,1	390	19,1	18,6	2,0	38,1	37,2	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	33,8	301	14,7	14,3	0,5	7,3	7,2	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	1,8	10	0,5	0,5	0,5	0,2	0,2	1,0	0,2
6	Kacang-kacangan	19,2	60	2,9	2,9	2,0	5,9	5,7	10,0	5,7
7	Gula	12,5	50	2,5	2,4	0,5	1,2	1,2	2,5	1,2
8	Sayur dan Buah	236,4	123	6,0	5,9	5,0	30,1	29,3	30,0	29,3
9	Lain-lain	82,8	43	2,1	2,0	-	-	-	-	-
	Total		2,048	100,0	100.3		109,1	106,4	100,0	91,0

*Keterangan = *) Angka Kecukupan Energi* 2,100.0 *Kkal/Kapita/Hari*

Sumber Data : Susenas 2023, BPS Justifikasi dan diolah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

1. Konsumsi Protein

Widya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI Tahun 2018 menetapkan bahwa konsumsi protein yang ideal yaitu 57 gram/kap/hari, gambaran konsumsi protein kota Batam pada tahun 2023 sudah memenuhi anjuran yaitu mencapai 67.5 gram/kapita/hari atau sebesar 118.5%

Tabel 3.6. Situasi Konsumsi Pangan Penduduk Kota Batam Tahun 2023 (Total Wilayah)) dengan AKP 57 gram/kap ita kkal/kap/hari

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Hari			Konsumsi Protein Per Hari		
		Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Gram/Kapita	%	% AKP**)
1	Padi-padian	1,033	50.5	49.2	23.4	34.6	41.0
2	Umbi-umbian	37	1.8	1.8	0.5	0.7	0.8
3	Pangan Hewani	390	19.1	18.6	32.5	48.1	56.9
4	Minyak dan Lemak	301	14.7	14.3	0.1	0.1	0.2
5	Buah/Biji Berminyak	10	0.5	0.5	0.1	0.2	0.2
6	Kacang-kacangan	60	2.9	2.9	5.4	8.0	9.5
7	Gula	50	2.5	2.4	0.1	0.2	0.3
8	Sayur dan Buah	123	6.0	5.9	4.2	6.2	7.4
9	Lain-lain	43	2.1	2.0	1.3	1.9	2.2
	Total	2,048	100.0	97.5	67.5	100.0	118.5

*Keterangan = *) Angka Kecukupan Energi* — 2,100 *Kkal/Kapita/Hari*

***) Angka Kecukupan Protein* — 57.0 *Gram/Kapita/Hari*

Sumber Data : Susenas 2023, BPS Justifikasi dan diolah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

2. Keragaman dan Keseimbangan

Proporsi energi masing-masing kelompok pangan terhadap total energi yang dikonsumsi menggambarkan keragaman dan keseimbangan konsumsi penduduk. Pada tahun 2018 konsumsi energi perkapita sebesar 2.125.09 Kkal/kapita/hari sebesar 2.398.54 atau untuk AKE

2.150 kkal/kap/hari sebesar 98.8%, dan pada tahun 2019 sebesar 2.398.54 Kkal/kapita/hari sebesar 111.6%. Tahun 2020 untuk AKE 2.150 kkal/kap/hari sebesar 113,1% 2021 2.211 kkal/kap/hari sebesar Sedangkan 2021 2.211 kkal/kap/hari sebesar 100.3% . Dari segi komposisi (keragaman) tampak sumbangan energi masing-masing kelompok pangan terhadap AKE adalah sebagai berikut :

- **Kelompok Pangan Padi-padian**

Kelompok padi-padian pada tahun 2018 masih mendominasi sumbangan energy yaitu sebesar 1,076.5 Kkal/Kap/hari atau 50.1% AKE, pada tahun 2019 kelompok padi-padian menyumbang energi sebesar 1.260,1 Kkal/Kap/hari atau 58.6% AKE Anjuran konsumsi padi-padian sebesar 50% AKE, pada 2020 sebesar 1.263 Kkal/Kap/hari atau 58,7% Tahun 2021 sebesar 1.162 Kkal/Kap/hari Atau 52.6% dan pada tahun 2023 sebesar 1.099 Kkal/Kap/hari Atau 52.2% .Pada Anjuran konsumsi padi-padian sebesar 50%, yang berarti sudah melebihi oleh karena itu perlu edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi konsumsi pada kelompok padi-padian dngan mengoptimalkan potensi lokal.

- **Kelompok umbi-umbian**

Kelompok umbi-umbian pada tahun 2018, menyumbangkan energy sebesar 49.3 Kkal/kap/hari atau sebesar 2,3%AKE sedangkan pada tahun 2019 kelompok umbi-umbian menyumbang energi sebesar 34,5 Kkal/Kap/hari atau 1,6% AKE, Kelompok umbi-umbian pada tahun 2020 menyumbangkan energy sebesar 43 Kkal/kap/hari atau sebesar 2,0% Kelompok umbi-umbian pada tahun 2021

menyumbangkan energy sebesar 38 Kkal/kap/hari atau 1.2 dan Kelompok umbi-umbian pada tahun 2023 menyumbangkan energy sebesar 47.6 Kkal/kap/hari atau 2.3 walaupun ada kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2023, ini masih belum mencapai anjuran konsumsi umbi-umbian sebesar 6,0 %, yang berarti masih sangat jauh dari anjuran. Untuk itu kerjasama dengan berbagai institusi terkait guna pengembangan teknologi pengolahan dan pengembangan resep serta sosialisasi konsumsi pangan B2SA perlu terus dilakukan untuk mendorong peningkatan konsumsi umbi-umbian.

- **Kelompok pangan hewani**

Kelompok pangan hewani pada tahun 2018 memberikan kontribusi energy sebesar 378.9 Kkal/kap/hari atau 17.6% AKE, sedangkan pada tahun 2019 kelompok pangan hewani menyumpang energi sebesar 400,3 atau 18,6% AKE dan pada tahun 2020 memberikan kontribusi energy sebesar 413 Kkal/kap/hari atau 19,2%, tahun 2021 sebesar 396 Kkal/kap/hari atau 17,9 % dan pada tahun 2023 sebesar 352.6 Kkal/kap/hari atau 16.7 % dimana proporsi ideal konsumsi kelompok pangan hewani adalah 12 % (melebihi konsumsi ideal).

- **Kelompok Minyak & Lemak**

  Kelompok minyak dan lemak pada tahun 2018 memberikan kontribusi energy sebesar 306.6 Kkal/kap/hari atau 14,3%AKE sedangkan pada tahun 2019 kelompok minyak dan lemak menyumbang energi sebesar 355 Kkal/kap/hari atau 16,5% AKE dan Kelompok minyak dan lemak pada tahun 2020 memberikan kontribusi energy sebesar 367 Kkal/kap/hari atau 17,1% tahun 2021 memberikan kontribusi energy sebesar 332 Kkal/kap/hari atau 15% dan tahun 2023 memberikan kontribusi energy sebesar 287.3 Kkal/kap/hari atau 13.7% tahun ini telah terjadi peningkatan karena ideal konsumsi untuk minyak dan lemak yaitu 10 % AKE, maka konsumsi minyak dan lemak harus diturunkan.

- **Kelompok buah/biji berminyak**

  Kelompok buah/biji berminyak pada tahun 2018 memberikan kontribusi energy 34 Kkal/kap/hari atau 1.6% AKE, sedangkan pada tahun 2019 kelompok buah/biji berminyak menyumbang energi sebesar 31,9 Kkal/kap/hari atau 1,5% AKE dan Kelompok buah/biji berminyak pada tahun 2020 memberikan kontribusi energy 30 Kkal/kap/hari atau 1.4%. Kelompok buah/biji berminyak pada tahun 2021 memberikan kontribusi energy 14 Kkal/kap/hari atau 0.6% AKE dan Kelompok buah/biji berminyak pada tahun 2023 memberikan kontribusi energy 14.4 Kkal/kap/hari atau 0.7% AKE dimana untuk konsumsi yang dianjurkan sebesar 3,0% AKE, oleh karena itu konsumsi buah biji berminyak perlu ditingkatkan.

- **Kelompok kacang-kacangan**

  Kelompok kacang-kacangan pada tahun 2018 memberikan kontribusi energy sebesar 50.9 Kkal/Kap/hari atau 2.4% AKE sedangkan pada tahun 2019 kelompok kacang-kacanganmenyumbang energi sebesar 46,8 Kkal/kap/hari atau 2,4%AKE,

pada tahun 2020 memberikan kontribusi energy sebesar 51 Kkal/Kap/hari atau 2.4% AKE pada tahun 2021 memberikan kontribusi energy sebesar 51 Kkal/Kap/hari atau 2.4% AKE dan pada tahun 2023 memberikan kontribusi energy sebesar 61.1 Kkal/Kap/hari atau 2.9% AKE dimana masih harus ditingkatkan karena untuk idealnya harus 5 % AKE.

- **Kelompok Pangan gula**

Kelompok pangan gula pada tahun 2018 memberikan kontribusi energy sebesar 95.5 Kkal/Kap/hari atau 4.4% AKE, sedangkan pada tahun 2019 kelompok pangan gula menyumbang energi sebesar 93,3 Kkal/kap/hari atau 4,3% AKE, pada tahun 2020 memberikan kontribusi energy sebesar 76 Kkal/Kap/hari atau 3,6% AKE pada tahun 2021 memberikan kontribusi energy sebesar 70 Kkal/Kap/hari atau 3,3% AKE dan pada tahun 2023 memberikan kontribusi energy sebesar 79 Kkal/Kap/hari atau 3,8% AKE terdapat peningkatan dari tahun lalu tetapi masih harus ditingkatkan karena untuk idealnya harus 5% AKE.

- **Kelompok sayur dan buah**

Kelompok sayur dan buah pada tahun 2018 memberikan kontribusi energy sebesar 101.5 Kkal/Kap/hari atau 4.7% AKE, sedangkan pada tahun 2019 kelompok sayur dan buah menyumbang energi sebesar 125,6 Kkal/kap/hari atau 5,8% pada tahun 2020 memberikan kontribusi energy sebesar 129 Kkal/Kap/hari atau 6,0% AKE pada tahun 2021 memberikan kontribusi energy sebesar 109 Kkal/Kap/hari atau 5.2% AKE dan pada tahun 2023 memberikan kontribusi energy sebesar 118 Kkal/Kap/hari atau 5.7% AKE sudah ideal, tetapi masih harus ditingkatkan karena untuk idealnya harus 6% AKE.

Dengan demikian, untuk memperbaiki pola konsumsi masyarakat agar menuju kondisi beragam, bergizi, dan berimbang, maka upaya peningkatan konsumsi umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula serta sayuran dan buah. Selain itu diupayakan penurunan konsumsi padi-padian, pangan hewani,minyak dan lemak.

3. Pola Konsumsi Pangan Penduduk

Bila dilihat per kelompok pangan, situasi konsumsi pangan penduduk Kota Batam tahun 2023 (Tabel 5 dan 6) sebagai berikut:

a. Kelompok Pangan Padi-padian

Kelompok pangan padi-padian di Kota Batam tahun 2023 sebesar 287.6 gram/kap/hari ini sudah diatas angka anjuran kecukupan konsumsi padi-padian sebesar 275 gram/kap/hari (100,3 kg/kapita/tahun); maka konsumsi padi-padian sudah mencapai ajuran Pemerintah. Bila ditelaah lebih lanjut per jenis pangan, kenaikan konsumsi beras berasal dari beras yang dimasak di rumah tangga , beras yang dikonsumsi diluar rumah tangga/beras dari makanan jadi (kue basah, nasi rames dan lontong/ketupat sayur, demikian juga beras yang berasal dari olahan pabrik (bubur bayi kemasan).

b. Kelompok Pangan Umbi-umbian

Kelompok pangan umbi-umbian tahun 2023 sebesar 46.5 gram/kapita/hari (16.69 kg/kapita/tahun). Bila dibandingkan dengan angka anjuran kecukupan konsumsi umbi-umbian sebesar 100 gram/kap/hari maka masih perlu untuk ditingkatkan sesuai denagan anjuran Pemerintah;

c. Kelompok Pangan Hewani

Konsumsi kelompok pangan sumber protein hewani (pangan hewani) pada tahun 2023 sebesar 180.7 gram/kapita/hari atau 66 Kg/kapita/tahun. Bila dibandingkan dengan angka anjuran kecukupan konsumsi pangan hewani sebesar 150 gram/kap/hari, konsumsi pangan hewani perlu diturunkan sebesar 30.7 gram/kapita/hari.

d. Kelompok Pangan Minyak dan Lemak

Konsumsi kelompok pangan minyak dan lemak pada tahun 2023 sebesar 32.1 gr/kap/hr atau 10,7 kg/kapita/tahun. Anjuran 20 gram/kapita/hari, maka kondisi ini perlu diturunkan.

e. Kelompok Pangan Buah/Biji Berminyak

Konsumsi Kelompok pangan buah/biji berminyak pada tahun 2023 yaitu 2,6 gram/kapita/hari atau 0.9 kg/kapita/tahun. Pada kelompok ini konsumsi yang dianjurkan sebesar 3.9 gram/kap/hari atau perlu dinaikkan 1,3 gram/kapita/hari.

f. Kelompok Pangan Kacang-kacangan

Konsumsi Kelompok pangan kacang-kacangan pada tahun 2023 yaitu 23.2 gram/kapita/hari. Pada kelompok ini konsumsi yang dianjurkan sebesar 35 gram/kap/hari atau perlu dinaikkan 11.8 gram/kapita/hari, oleh karena itu kecukupan konsumsi kelompok kacang-kacangan perlu ditingkatkan.

g. Kelompok Pangan Gula

Konsumsi Kelompok pangan gula pada tahun 2023 yaitu 21.3 gram/kapita/hari atau 7.8 Kg/kapita/tahun. Pada kelompok ini konsumsi yang dianjurkan sebesar 30 gram/kap/hari atau perlu dinaikkan 8,7 gram/kapita/hari, oleh karena itu kecukupan konsumsi kelompok gula perlu ditingkatkan

h. Kelompok pangan Sayur dan Buah

Konsumsi Kelompok sayur dan buah pada tahun 2023 yaitu 252,5 gram/kapita/hari atau 92,1 kg/kapita/tahun. Pada kelompok ini konsumsi yang dianjurkan sebesar 250 gram/kap/hari atau perlu diturunkan 2.5 gram/kapita/hari

Tabel 3.7. Pola Konsumsi Pangan Penduduk Kota Batam Tahun 2023

Kode Pangan	Kelompok/Jenis Pangan	Total Wilayah			
		Kandungan Gizi		Berat Pangan	
		Energi Kkal/Hari	Protein Gram/Hari	Gram Per Hari	Kilogram Per Tahun
	1. Padi-Padian				
1	Beras	841.5	19.8	237.3	86.6
2	Jagung	3.1	0.1	2.1	0.8
3	Terigu	254.9	5.6	48.3	17.6
	Subtotal Padi-padian	1,099.5	25.5	287.6	105.0
	2. Umbi-umbian				
4	Singkong	33.4	0.2	27.6	10.1
5	Ubi Jalar	5.0	0.0	3.8	1.4
6	Kentang	7.3	0.2	14.1	5.1
7	Sagu	0.9	0.0	0.3	0.1
8	Umbi Lainnya	0.9	0.0	0.8	0.3
	Subtotal Umbi-umbian	47.6	0.6	46.5	17.0
	3. Pangan Hewani				
9	Daging Ruminansia	65.4	4.0	13.2	4.8
10	Daging Unggas	120.5	8.1	39.6	14.5
11	Telur	39.1	3.1	28.5	10.4

12	Susu	47.1	1.8	12.2	4.4
13	Ikan	80.5	13.6	87.3	31.8
	Subtotal Pangan Hewani	352.6	30.6	180.7	66.0
	4. Minyak dan Lemak				
14	Minyak Kelapa	2.7	0.0	0.3	0.1
15	Minyak Lainnya	262.8	-	29.1	10.6
16	Margarin	21.8	0.0	2.6	1.0
	Subtotal Minyak dan Lemak	287.3	0.0	32.1	11.7
	5. Buah/Biji Berminyak				
17	Kelapa	11.2	0.1	2.1	0.8
18	Kemiri	3.2	0.1	0.5	0.2
	Subtotal Buah/Biji Berminyak	14.4	0.2	2.6	1.0
	6. Kacang-kacangan				
19	Kacang Kedelai	53.7	4.7	20.8	7.6
20	Kacang Tanah	3.9	0.2	0.9	0.3
21	Kacang Hijau	1.7	0.1	0.9	0.3
22	Kacang lain	1.8	0.1	0.6	0.2
	Subtotal Kacang-kacangan	61.1	5.2	23.2	8.5
	7. Gula				
23	Gula Pasir	74.5	0.0	20.1	7.3
24	Gula Merah	4.5	0.0	1.2	0.4
	Subtotal Gula	79.0	0.1	21.3	7.8
	8. Sayur dan Buah				
25	Sayur	62.1	3.4	154.7	56.4
26	Buah	56.8	0.8	97.8	35.7
	Subtotal Sayur dan Buah	118.9	4.2	252.5	92.2
	9. Lain-lain				
27	Minuman	39.4	1.1	73.1	26.7
28	Bumbu	5.5	0.2	9.5	3.5
	Subtotal Lain-lain	44.9	1.3	82.6	30.2

Sumber Data : Susenas 2023, BPS Justifikasi dan diolah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

Sasaran OPD : Terjaganya Keanekaragaman, Ketersediaan dan keamanan pangan

1. Persentase Pangan Segar Aman Konsumsi

IKU Indikator Persentase Pangan Segar Aman Konsumsi adalah salah satu indikator keamanan pangan yang menggambarkan kinerja Dinas dalam melayani masyarakat terhadap ketersediaan pangan yang aman dan layak dikonsumsi.

Keamanan pangan merupakan syarat penting yang harus melekat pada pangan yang hendak dikonsumsi oleh semua masyarakat. Keamanan pangan bukan hanya merupakan isu dunia tapi juga menyangkut kepedulian individu. Jaminan akan keamanan pangan adalah merupakan hak asasi konsumen. Pangan termasuk kebutuhan dasar terpenting dan sangat esensial dalam kehidupan manusia. Walaupun pangan itu menarik, nikmat, tinggi gizinya jika tidak aman dikonsumsi, praktis tidak ada nilainya sama sekali. Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia (Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Dalam hal ini Bidang Ketahan Pangan khusus nya seksi Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan melakukan Pengambilan dan pengujian sampel buah segar di di pasar tradisional dan distributor. Sasaran dalam pelaksanaan pengawasan sayur ini berguna untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya pangan yang akan dikonsumsi khususnya pangan segar harus aman dan bebas dari pestisida sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomer : 53/Permentan /KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Uji keamanan pangan dilakukan terhadap komoditas yang diduga mengandung pestisida, formalin dan boraks. Pengambilan sampel hanya dilakukan di 3 (tiga) lokasi yaitu pasar Sei Harapan, Tiban Centre dan Aviari. Target sampel yang diuji adalah sebanyak 71 (Tujuh Puluh satu) sampel. Pada tahun 2018, sampel yang diuji sebanyak 71 Tujuh Puluh satu) samp el. sampel mengandung pestisida sebanyak 5 (Lima) buah atau 92.96% yang aman konsumsi dari sampel yang di uji.

Pada 2019 Target sampel yang diuji adalah sebanyak 56 (Lima Puluh Enam) sampel. Dari 56 Sampel yang di uji laboratorium tidak ditemukan Mengandung Bahan berbahaya dapat dikatakan 100% yang aman konsumsi dari sampel yang di uji. Pada 2020 Target sampel yang diuji adalah sebanyak 12 sampel. Dari 12 Sampel yang di uji laboratorium tidak ditemukan Mengandung Bahan berbahaya dapat dikatakan 100% yang aman konsumsi dari sampel yang di uji. Pada 2021 Target sampel yang diuji adalah sebanyak 30 sampel. Dari 30 Sampel yang di uji laboratorium tidak ditemukan Mengandung Bahan berbahaya dan dapat dikatakan 100% yang aman konsumsi dari sampel yang di uji. Untuk tahun 2023 Pengujian sampel dilakukan dengan berbagai metode sesuai dengan parameter yang digunakan yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.8 Metode dan parameter pengujian sampel.

No	Parameter	Testing Method
1.	Residues Of Organocholorine Pesticide	GC (Gas Cromatography)
2.	Residues Of Organophospphate Pesticide	GC (Gas Cromatography)
3.	Residues Of Pyretroid Pesticide	GC (Gas Cromatography)
4.	Residues Of Carbamate Pesticide	LC MS MS (Liquid chromatography-mass spectrometry)
5.	Residues Of Other Pesticide	LC MS MS (Liquid chromatography-mass spectrometry)
6.	Heavy Metal	AAS (Atomic Absorption Spectrometer)
7.	Microbial Contaminant (Escherichia coli)	ISO 7251:2005
8.	Microbial Contaminant (Salmonella sp)	ISO 6579 :2002

Pada Tahun 2023, target sampel yang diuji sebanyak 60 sampel dan dilakukan pengujian di Laboratorium PT. Mutu Agung Lestari yang beralamat di Jalan raya Bogor KM 33.5 No. 19 Cimanggis Depok Provinsi Jawa Barat. Hasil dari pengujian yaitu semua sampel dinyatakan negatif baik kandungan pestisida, logam berat maupun mikroba (salmonella sp dan escherichia coli) (dibawah BMR) artinya aman untuk di Konsumsi. Jadi hasil uji 100% aman untuk di konsumsi dari target 100% aman konsumsi.

2. **Ketersediaan Pangan Utama (kg / 1.000 orang**)

Salah satu indikator untuk mengetahui ketersediaan pangan utama adalah dengan melakukan penyusunan Neraca Bahan Makanan. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X tahun 2012 yaitu merekomendasikan kriteria ketersediaan pangan ditetapkan minimal 2.400 kkal/kapita/hari untuk energi dan minimal 63 gram/kapita/hari untuk protein. Ketersediaan energi pada tahun 2018 yaitu 3,308 Kkal/Kap/hari sedangkan ketersediaan protein 70.12 gram/kapita/hari diatas rekomendasi WNPG X Tahun 2012. Ketersediaan pangan utama tahun 2017 sebesar 129.889 (kg/1000 orang) atau 126.11% dari target

yang ditetapkan (103.000 kg/1000 orang). Ketersediaan pangan utama tahun 2018 sebesar 97.135 (kg/1000 orang) atau 93.40% dari target yang ditetapkan (104.000 kg/1000 orang). Ketersediaan pangan utama tahun 2019 sebesar 108.460 (kg/1000 orang) atau 103.29% dari target yang ditetapkan (105.000 kg/1000 orang). Ketersediaan pangan utama tahun 2020 sebesar 108,458 (kg/1000 orang) atau 102.3% dari target yang ditetapkan (106.000 kg/1000 orang). Ketersediaan pangan utama tahun 2021 sebesar 155.402 (kg/1000 orang) atau 145,24% dari target yang ditetapkan (107.000 kg/1000 orang). Ketersediaan pangan utama tahun 2023 sebesar 154.370 (kg/1000 orang) atau 142,9% dari target yang ditetapkan (108.000 kg/1000 orang)

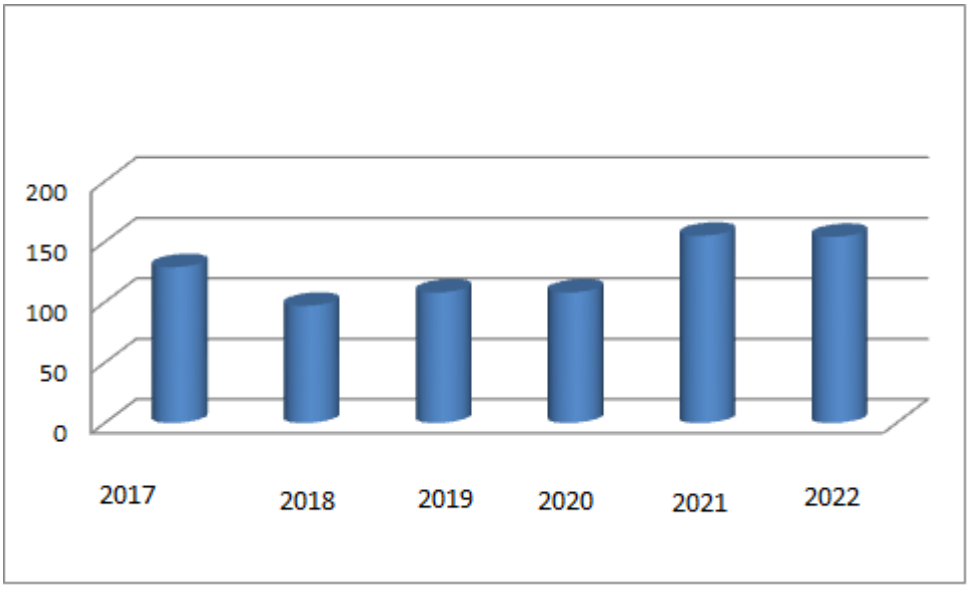

Gambar 3.2 Ketersediaan Pangan Utama dari tahun 2017 s,d 2023

Sasaran : Meningkatnya Produksi hasil Pertanian dan Peternakan

Keberhasilan pencapaian **sasaran strategis yang ke 2** pada tahun 2023 yaitu Meningkatnya Produksi hasil Pertanian dan Peternakan, diukur melalui pencapaian 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) yaitu:

1. Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)

   Capaian indikator Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (komoditas palawija dan hortikultura adalah merupakan hasil kenaikan produksi pertanian dari tahun sebelumnya dibagi dengan tahun sebelumnya di kali dengan 100. Produksi pertanian tahun 2021 adalah 31.218 dan produksi pertanian tahun 2023 adalah 32.381,37, kenaikan 1.163 jadi didapat kenaikan Produksi Pertanian Sebesar 3.73 % dari Target 3.5%

3.9. Produksi Pertanian Tahun 2021 dan 2023

NO	Komodoti	Produksi Th 2021 (Ton)	Produksi Th 2023 (Ton
1	Palawija	12351	12587.2
2	Sayur - Sayuran	14912.7	15044.64
3	Buah - Buahan :	2080.2	2754.05
4	Biofarmaka	1819.43	1995.48
	Jumlah	31218	32381.37

2. **Persentase peningkatan produksi ternak sapi**

   Persentase Peningkatan Produksi Ternak sapi di tahun 2023 adalah

   $$= \frac{\text{Populasi 2023} - \text{Populasi 2022}}{\text{Populasi 2022}} \times 100\ \%$$

   $$= \frac{305 \text{ ekor} - 250 \text{ ekor}}{250 \text{ ekor}} \times 100\ \%$$

   = 22 %

   Persentase Peningkatan Produksi Ternak sapi di tahun 2023 realisasi dengan capaian sebesar 22 %. Hal ini di sebabkan oleh Tidak adanya Pemasukan Sapi Pengembangan karena Penyakit Mulut dan Kuku (Foot And Mouth Disease) dan Sapi Pengembangan yang berada di pulau ada yang mati .

IKU (Indek Kinerja Utama) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, seksi Perbibitan dan Produksi ternak dimana Populasi ternak sapi mengambarkan jumlah sapi yang

ada di Kota Batam yang menjadi tanggungjawab Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk meningkatkan jumlah populasi ternak sapi Capaian Kinerja 2023 Dari Populasi normal ternak yang ada sebanyak 250 ekor (kondisi awal Renstra) dan di tahun 2023 target kinerja sebanyak 305 ekor realisasi 305 ekor (penambahan 55 ekor) dan di tahun 2018 target sebanyak 509 ekor dan realisasi sebanyak 26 ekor (13 KK) dari target dari Renstrahanya 14 ekor. Melalui Kegiatan Peningkatan Mutu Bibit dan Pakan Ternak untuk tahun 2019 sebanyak 19 ekor yang terdiri 2 ekor jantan dan 17 ekor betina. Dimana dari hasil CPCL oleh Tim teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dapat dirinci penyebaran populasi ternak tersebut sebagai beikut kelompok Kemang Abadi Bulang Kebam sebanyak 3 ekor betina dan Kelompok Mekar Sari Bulang Lintang sebanyak 10 ekor, 1 jantan dan 9 ekor (5 KK) betina dan kelompok Pemping Sinar Karya II sebanyak 6 ekor (3 KK) terdiri dari 5 ekor betina dan 1 ekor jantan Target 559, Kegiatan Peningkatan Mutu Bibit, Produksi dan Pakan ternak untuk tahun 2020 sebanyak sebanyak 6 ekor (3 KK) terdiri dari 5 ekor betina dan 1 ekor jantan dimana dari hasil CPCL oleh Tim Teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dapat dirinci penyebaran populasi ternak tersebut sebagai berikut kelompok Mekar Sari II, Bulang Lintang – Bulang sesuai dengan Renstra namun realisasi sampai dengan tahun 2020 sebanyak 609 ekor dengan capaian sebesar 119,21%, Kegiatan Peningkatan Mutu Bibit Produksi dan Pakan ternak untuk tahun 2023 sebanyak 305 ekor (61 KK) terdiri dari 123 ekor Jantan dan 182 ekor Betina, dimana dari hasil CPCL oleh Tim Teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dapat dirinci penyebaran populasi ternak tersebut sebagai berikut sebanyak 9 ekor dengan rincian 2 ekor jantan dan 7 betinadi Pulau Pecong, sebanyak 10 ekor dengan rincian 3 ekor jantan dan 7 betina di Pulau Pemping, Kelompok Maju Jaya Pulau Kepala Jeri sebanyak 112 ekor dengan rincian 55 ekor jantan dan 57 betina, Bulang Lintang dan Setokok sebanyak 114 ekor dengan rincian 53 ekor jantan dan 61 betina dan sebanyak 60 ekor dengan rincian 10 ekor jantan dan 50 betina di Kecamatan Galang. sesuai dengan Renstra namun realisasi sampai dengan tahun 2023 dengan capaian sebesar 119,21% dengan produktifitas **sangat tinggi**. Selain dari kegiatan program pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam pada Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target Kinerja per Triwulan untuk populasi ternak sapi karena hari Keagamaan sudah tersedia komoditi daging sapi segar di TRIWULAN II sedangkan Kegiatan Peningkatan Produksi, Mutu Bibit dan Pakan Ternak terealiasi pada Triwulan III (Bulan Agustus 2020) sesuai dengan NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah) dan Berita Acara penyerahan Sapi dan SK Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Sapi Pemerintah tahun 2020, dengan produktifitas

populasi sapi di Triwulan II dan III sangat tinggi hal ini disebabkan setiap tahunnya bersempena dengan hari Raya Idul fitri dan Idul Adha , data yang ada terdapat populasi ternak untuk hewan qurban di temiang 1800 ekor, dan di luar temiang hewan qurban 1581 ekor dengan Total keseluruhan berjumlah 3381 ekor Selain ternak ruminansia besar sapi juga dipenuhi dari ternak Kambing/domba dengan rincian di temiang berjumlah 5643 ekor dan di luar temiang 3871 ekor dan total keseluruhan berjumlah 9.514 ekor. (data terlampir).

Masalah dan Solusi

1. Populasi pertahun tidak sesuai dengan yang dialokasikan, sehingga populasi kelompok belum semua diakomodir sesuai ketentuan teknis dan CPCL kegiatan.

   Progress dan sinergitas dalam menumbuh kembangkan kelompok masih belum optimal sehingga diharapkan ada kelompok petani peternak yang handal dan mandiri setiap tahunnya dan ada Penilaian kelompok untuk melihat kinerja dan peningkatan Status belum ada sentuhan dan Pembinaan Kelembagaan dan report dari PPL sesuai dengan WKPP binaan.

2. Belum optimal di berdayakan kelompok peternak oleh petugas dan bidang dalam hal SPIP (system pengendalian Internal Pemerintah) sehingga belum ada kejelasan status dari hasil pembinaan bagi kelompok ternak yang ada (pemula, handal, tangguh dan mandiri) yang dinilai setiap tahunnya.

- <u>Populasi Ternak Sapi</u>

  Populasi = Jumlah ternak yang dipelihara oleh petani peternak dihitung berdasarkan sensus tahunan (Sp) 10 kali.

  Peningkatan Populasi

  = Jumlah Ternak yang Dipelihara Peternak + Penampungan (instansi) + Pemasukan + Kelahiran - Kematian + Pemotongan + Mutasi ternak / luar Batam.

Sasaran 3: Meningkatnya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan strategis dan penyakit zoonosis.

Keberhasilan **sasaran strategis yang ke-3** pada tahun 2023 yaitu **Meningkatnya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan strategis dan penyakit zoonosis,** diukur melalui pencapaian indikator kinerja utama (IKU)

1. Persentase hewan yang sehat dan produk asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (persentase hasil lab negative ditambah persentase lokus yang terealisasi dibagi dua) (%). Pada tahun 2023 Persentase hewan yang sehat dan produk asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal adalah 85%. IKU Persentase hewan yang sehat dan produk asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal untuk Sasaran terkendalinya kasus penyakit strategis dan zoonosis ini mempunyai satu komponen indikator yang sangat penting untuk meningkatkan taraf kesehatan dan perluasan akses layanan, yaitu berupa jumlah kasus penyakit zoonosis. Penyakit Zoonosis adalah penyakit dan infeksi yang dapat menular dari hewan vertebrata ke manusia atau sebaliknya. Penyakit Zoonosis disebabkan oleh pathogen seperti Bakteri, Virus, Fungi serta Parasit. Di Indonesia terdapat 15 jenis Penyakit Zoonosis Prioritas di Indonesia meliputi : Avian Influenza, Anthraks, Fasciolasis, Rabies, Brucellosis, Leptospirosis, Japanese B. Encephalitis, Bovine Tuberculosis, Salmonellosis, Schistosomiasis, Q-Fever, Champylobacteriosis, Trichinellosis, Paratuberculosis, Toksoplasmosis dan

Cysticercosis/Taeniasis.

Indikator jumlah kasus penyakit zoonosis termasuk dalam Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis dimana salah satu tujuan kegiatan yaitu menurunnya kasus penyakit zoonosis berupa Menurunnya jumlah kasus positif Avian Influenza di Lokasi Peternakan Ayam Komersial dan Pasar Unggas di Kota Batam. Tindakan strategis yang di Lakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam selaku Instansi yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan meliputi Surveilans dan monitoring penyakit hewan (keswan) dan Prosuk Asal Hewan (Kesmavet), Terlaksananya KIE/Sosialisasi penyakit menular zoonosis, pemeriksaan kesehatan hewan dan produk asal hewan, pengobatan hewan, pengawasan lalu lintas hewan, deteksi dini penyakit hewan dan respon cepat terhadap adanya kejadian penyakit hewan di Kota Batam.

Tiap Tahun Terjadi Penurunan Kasus Kejadian Kematian Unggas karena Penyakit Unggas Menular Avian Influenza dan New Castle Disease sebanyak 4 Kasus Kematian Unggas pada jumlah populasi unggas dalam satu kandang/flok sebanyak 2000 ekor.

- Jenis sampel yang diambil adalah serum darah, swab kloaka dan swab lingkungan di Peternakan Ayam Buras, Broiler dan Layer.
- Target penurunan kasus penyakit hewan menular tiap tahun adalah dengan cara pengendalian penyakit Avian Influenza/Flu Burung dan penyakit New Castle Disease (ND) pada unggas/ayam di Kota Batam.
- Kegiatan yang dilaksanakan untuk menurunkan kasus kejadian penyakit Avian Influenza/Flu Burung dan New Castle Disease (ND) adalah berupa Surveilans dan Monitoring Penyakit hewan berupa Pengambilan Sampel dan Pengujian Sampel di Laboratorium Keswan dan Kesmavet Terakreditasi yaitu Balai Veteriner Bukittinggi untuk Menguji tingkat titer Antibodi/tingkat kekebalan Unggas terhadap penyakit Avian

Influenza dan New Castle Disease serta Mendeteksi Adanya Transmisi Virus AI/Avian Influenza di Kandang/Flok.

- Tiap Tahun dilaksanakan Surveilans sebanyak 4 Kali Baik yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Keswan Provinsi Kepri maupun Balai Veteriner Bukittinggi.
- Saran dan anjuran ke peternakan adalah untuk menurunkan jumlah kasus penyakit di peternakan unggas adalah dengan mengawasi allu lintas unggas, memperbaiki biosekuriti, desinfeksi, manajemen dan sanitasi kandang, dan vaksinasi yang baik dan tepat (coverage vaksinasi 99%).

- Untuk Tahun 2023 kasus kejadian penyakit pada unggas pada flok dengan jumlah populasi ayam 2000 ekor adalah 20 Kasus kejadian mortalitas/kematian unggas.
- Tiap Tahun dapat ditekan kematian unggas sebanyak 4 kasus.

Diharapkan di tahun mendatang pelaksanaan surveilans dan monitoring penyakit hewan baik pada unggas maupun hewan/ternak lainnya lebih sering dilaksanakan sehingga traceback atau penelusurun kembali penyakit hewan akan semakin cepat dan baik (deteksi dini).

c. Penyelenggaraan kesehatan hewan

Saat ini secara global, antara sistem kesehatan manusia dan kesehatan hewan telah mempunyai konsep One Health yaitu bagaimana mengelola ancaman kesehatan pada irisan antara kesehatan ekosistem, kesehatan hewan dan kesehatan manusia. One Health mengenal bahwa kesehatan manusia, hewan dan ekosistem dimana kita adalah bagian di dalamnya, saling terhubung satu sama lain.

Dalam kaitannya dengan Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Siskeswannas) maka pelayanan kesehatan hewan dan penjaminan keamanan mutu pangan asal hewan merupakan salah satu sub sistem

pembinaan kesehatan hewan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan hewan sehingga produksi dan produktivitas hewan dapat ditingkatkan secara optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan serta penjaminan keamanan mutu pangan asal hewan harus terus menerus dilaksanakan di Kota Batam mengingat bahwa kebutuhan produk hewan khususnya Pangan Asal Hewan (PAH) terus mengalami peningkatan, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan UPTD. Puskeswan sebagai sentral kegiatan kesehatan hewan dan pelayanan kesehatan dan reproduksi hewan mengemban amanah yang bersifat publik yakni pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan. Puskeswan merupakan ujung tombak yang berhadapan langsung dengan kasus di lapangan sehingga diharapkan kasus penyakit hewan menular dapat dikendalikan dan tidak menyebar serta dapat dibebaskan kembali.

Peran Puskeswan meliputi pelayanan terkait dengan kesehatan hewan di wilayah kerjanya, konsultasi veteriner dan penyuluhan bidang kesehatan hewan, dan surat kesehatan dokter hewan. Sementara itu fungsi Puskeswan mencakup kegiatan (pelaksanaan, pemberian, dan pelayanan) penyehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, epidemiologis, informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah, dan jasa veteriner.

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh UPTD. Puskeswan Pemerintah Kota Batam pada TA. 2023 sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2020 jo. Peraturan Walikota Batam Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka terhitung sejak tanggal 2 November 2020 pelayanan penerbitan Rekomendasi Pengeluaran Hewan dan Rekomendasi Pengeluaran Produk Asal Hewan (PAH) dilaksanakan oleh Dinas PMPTSP.

2. Sesuai dengan SOP dan SPP tentang penerbitan Rekomendasi Pengeluaran Hewan dan/ atau PAH, sebelumnya harus dilaksanakan pemeriksaan hewan dan/ atau sampel PAH yang akan dilalulintaskan / dikeluarkan dari Kota Batam yang dilaksanakan di Puskeswan Pemko Batam dengan mengeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau Sertifikat Kesehatan Produk Asal Hewan (SKPAH) sebagai bukti pemeriksaan hewan dan / atau PAH.

3. Untuk menunjang kegiatannya, setiap Puskeswan harus dilengkapi dengan sarana dan peralatan menurut ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007. Berdasarkan ketentuan tersebut, persyaratan minimal sarana dan peralatan pada setiap Puskeswan terdiri dari:

   a. sarana bangunan fisik, sarana penunjang, peralatan dan kelengkapan kantor, sarana transportasi, obat-obatan, vitamin, vaksin, pestisida, dan materi sejenis lainnya;
   b. pakaian kerja petugas;
   c. peralatan-peralatan medis veteriner seperti peralatan klinik/diagnostik dan peralatan bedah;
   d. peralatan dan bahan laboratorium;
   e. peralatan pengumpul spesimen;
   f. peralatan reproduksi dan kebidanan;
   g. peralatan produksi; dan
   h. peralatan khusus peternakan.

4. Mulai tanggal 11 Januari 2021 sudah dilaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 67 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan. Pembayaran retribusi pelayanan kesehatan hewan dilakukan secara Non Tunai (dapat menggunakan kartu BRIZZI, Mesin EDC, Kartu Debit BRI atau Bank Lainnya) dan langsung masuk ke rekening kas daerah Pemerintah Kota Batam.

5. Jenis Pelayanan Kesehatan Hewan yang dilaksanakan di UPTD Puskeswan Pemerintah Kota Batam dibagi menjadi tiga kategori yaitu :

   a. **Pelayanan Pasif** adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskeswan dimana klien membawa hewan yang akan dimintakan pemeriksaan ke Puskeswan.
   b. **Pelayanan semi aktif** adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskeswan dengan cara

mendatangi lokasi setelah mendapatkan laporan dari klien.

c. **Pelayanan aktif** adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskeswan di tempat pelayanan kesehatan hewan atau kelompok ternak pada lokasi tertentu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditentukan.

6. Jenis Pelayanan Kesehatan Hewan yang dikenakan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan dan dilaksanakan di UPTD Puskeswan Pemerintah Kota Batam antara lain :
   a. Pelayanan Pemeriksaan Hewan dan Sampel PAH dalam rangka mobilisasi dalam kota dan ke luar Kota Batam serta penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau Sertifikat Kesehatan Produk Asal Hewan (SKPAH).
   b. Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Hewan yang dapat dilaksanakan UPTD Puskeswan saat ini antara lain :
      1) Pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan hewan dan ternak
      2) Pengobatan hewan kesayangan dan ternak;
      3) Vaksinasi hewan kesayangan (anjing dan kucing);
      4) Bedah ringan hewan kesayangan;
      5) Kunjungan ke Peternakan atau lokasi pemeliharaan hewan
      6) *Dental scaling* hewan kesayangan (anjing dan kucing).

Beberapa permasalahan dan kendala yang teridentifikasi antara lain ;

1. Secara garis besar ada tiga permasalahan mendasar yang dihadapi Puskeswan saat ini, yaitu belum lengkapnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana (infrastruktur); belum optimalnya kapasitas sumberdaya manusia; dan belum sempurnanya organisasi ketatalaksanaan (managemen).

2. Tidak tersedianya SDM dan anggaran yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pelayanan aktif ke daerah hinterland yaitu lokasi pengembangan ternak bantuan pemerintah dan ketidaksiapan peralatan dan obat-obatan saat terjadinya wabah pada hewan ternak, terutama penyakit prioritas seperti halnya African Swine Fever (ASF) dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

3. Kendala yang ada untuk operasional Puskeswan pada tahun ini adalah belum memadainya peralatan laboratorium, peralatan bedah dan peralatan diagnostik, serta Rapid Test untuk pemeriksaan unggas, ruminansia dan Pangan Asal Hewan (PAH) serta kurangnya SDM kesehatan hewan paramedik veteriner, khususnya untuk membantu

pelaksanaan tindakan pembedahan (operasi) dan kunjungan pemeriksaan hewan ke peternakan.

3.4 Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2023

1. Pagu dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023

DPA-SKPD tahun 2023 yang mencakup indikator kinerja *input, output, outcome*, diperoleh kesimpulan bahwa secara keseluruan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam sudah berjalan dengan baik yang secara umum mengalami Rasionisasi karena dari total 9 Kegiatan APBD/APBD-P Tahun 2023 yang dilaksanakan berkategori Efisien dan Efektif. Pagu anggaran APBD murni sebesar Rp. **14,040,902,776.00** setelah Perubahan APBD-P 2023 Pagu Anggaran menjadi Rp. **13,764,104,372.00**. tingkat realisasi Belanja Penyedian gaji dan tunjangan ASN yang ditetapkan sebesar **Rp 7,799,392,592.00** realisasinya sebesar **Rp 7,590,991,577.00** atau pesentase realisasi belanjanya **97.33 %.** Sedangkan Belanja Langsung yang ditetapkan sebesar **Rp 5,964,711,780.00** yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal, jumlah realisasinya Rp **5,291,772,362.00** atau **88.72 %** dengan demikian dapat dikatakan bahwa tahun 2023 cukup baik, dengan kondisi anggaran terakhir adalah **SILPA sebesar Rp 881,340,433.00.**

Tabel.3.13 Uraian Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2023

Uraian	Jumlah	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Belanja	**14,040,902,776**	**13,764,104,372**
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	**8,345,924,756**	**7,799,392,592**
Belanja Langsung	**5,694,978,020**	**5,964,711,780**
• Belanja Operasi	5,119,814,720	5,418,784,080
• Belanja Modal	575,163,300	545,927,700

Pagu anggaran dan realisasi APBD untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun Anggaran 2023 disajikan pada Belanja Operasi yang ditetapkan sebesar Rp 5,418,784,080.00 realisasinya sebesar Rp **4.749.557.362.00** atau pesentase realisasi belanjanya **87.65 % dan** Belanja Modal yang ditetapkan sebesar **Rp 545,927,700.00** realisasinya sebesar Rp **542,215,000.00** atau pesentase realisasi belanjanya **99.32 %** Sedangkan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang ditetapkan sebesar Rp **7,799,392,592.00** jumlah realisasinya Rp **7,590,991,577.00** atau **97.33** %. Dengan rincian realisasi per jenis belanjanya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.14. Rincian Realisasi Belanja pada Masing-Masing Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase (%)
Belanja	**13,764,104,372**	**12,882,763,939**	**93.60%**
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	**7,799,392,592**	**7,590,991,577**	**97.33%**
Belanja Langsung	**5,964,711,780**	**5,291,772,362**	**88.72%**
Belanja Operasi	5,418,784,080	4,749,557,362	**87.65%**
Belanja Modal	545,927,700	542,215,000	**99.32%**

Dari Tabel 3.14 diketahui bahwa penyerapan APBD Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian Kota Batam Tahun Anggaran 2023 baik untuk Belanja Langsung maupun Belanja Tak Langsung menunjukkan capaian kinerja yang berpredikat "**SANGAT TINGGI",** rata-rata mencapai **93.60%.**

2. Analisis Efisiensi dan Efektifitas Kegiatan

Untuk melihat sejauh mana tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan tahun 2023 dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan antara Capaian Input dan Capaian Output, maka dapat dianalis tingkat efisiensi dan efektifitas masing-masing kegiatan.

Tabel 3.15 Masukan, Keluaran dan Hasil Masing-masing kegiatan tahun 2023

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Capaian Kegiatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	7,859,852,592	7,650,851,577
Keluaran	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%
Hasil	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	100%
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Capaian Kegiatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	100%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	297,767,500	195,239,459
Keluaran	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%
Hasil	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	100%
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Capaian Kegiatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	1,580,655,480	1,518,567,608
Keluaran	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %
Hasil	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 %	100 %
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Capaian Kegiatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah	100%	100%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	181,460,000	169,976,700
Keluaran	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	100%
Hasil	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah	100%	100%
2. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
1. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota			
Capaian Kegiatan	Ketersediaan Energi	6.210 kkal per kapita per hari	2.766 kkal per kapita per hari
Masukan	Dana yang dibutuhkan	141,400,000	111,120,200
Keluaran	Persentase penguatan cadangan pangan Pemda	30%	34,00%
Hasil	Ketersediaan Energi	2607 kkal per kapita per hari	2.766 kkal per kapita per hari
2. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			
Capaian Kegiatan	Ketersediaan Energi	2610 kkal per kapita per hari	2.766 kkal per kapita per hari
Masukan	Dana yang dibutuhkan	1,301,132,000	1,104,103,300
Keluaran	Cakupan peserta yang mengikuti LCM dan Demo Masak B2SA (Kecamatan)	12 Kec	12 Kec
Hasil	Ketersediaan Energi	2607 kkal per kapita per hari	2.766 kkal per kapita per hari
3. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			

			per tahun	per tahun
2	**3. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**			
	1. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Capaian Kegiatan	Persentase wilayah aman pangan	70,31%	100%
	Masukan	Dana yang dibutuhkan	35,930,000	15,727,000
	Keluaran	Persentase wilayah rentan pangan yang ditangani	7,81%	100%
	Hasil	Persentase wilayah aman pangan	59,40%	43,77%
3	**4. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**			
	1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			
	Capaian Kegiatan	Persentase pangan aman yang dikonsumsi (PSAT)	90%	86%
	Masukan	Dana yang dibutuhkan	75,963,000	75,486,000
	Keluaran	Persentase sampel PSAT yang ditindaklanjuti ke Lab	43,33%	43,33%
	Hasil	Persentase pangan aman yang dikonsumsi (PSAT)	87%	99,37%
4	**5. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			
	1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			
	Capaian Kegiatan	Jumlah produksi ternak sapi	612 Ekor	305 Ekor
	Masukan	Dana yang dibutuhkan	654,145,000	588,603,784
	Keluaran	Jumlah Produksi Pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	33,603 Ton	20,990.8 Ton
	Hasil	Persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultira)	4%	3.50%
5	**6. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			
	1. Pembangunan Prasarana Pertanian			
	Capaian Kegiatan	Jumlah produksi karkas sapi dari RPH	1,555 Ton	233.4 Ton
	Masukan	Dana yang dibutuhkan	534,627,500	512,750,290
	Keluaran	Jumlah RPH yang dipelihara	2 Unit	2 Unit
	Hasil	Jumlah produksi karkas sapi dari RPH (Ton per tahun)	256 Ton	103.5 Ton
6	**7. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**			
	1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/			
	Capaian Kegiatan	Cakupan lokus atau lokasi surveilance hewan dan produk asal hewan	100%	85%
	Masukan	Dana yang dibutuhkan	147,270,000	52,820,000
	Keluaran	Persentase jumlah sampel keswan dan kesmavet yang diuji	85%	85%
	Hasil	Cakupan lokus atau lokasi surveilance hewan dan produk asal hewan (%)	85%	85%
	2. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Capaian Kegiatan	Cakupan lokus atau lokasi surveilance hewan dan produk asal hewan (%)	100%	80%
	Masukan	Dana yang dibutuhkan	875,347,300	810,263,821
	Keluaran	Jumlah frekuensi layanan kesehatan hewan melalui pemeriksaan kesehatan hewan dan pemeriksaan laboraturium kesehatan hewan/ produk asal hewan di UPTD. Puskeswan	1125 Kali	1383 kali
	Hasil	Cakupan lokus atau lokasi surveilance hewan dan produk asal hewan (%)	85%	85%
	8. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
	1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			
	Capaian Kegiatan	Persentase Peningkatan kelembagaan kelompok tani	60%	60%
	Masukan	Dana yang dibutuhkan	78,554,000	77,254,200
	Keluaran	Persentase kelompok tani yang dibina/dikembangkan	75%	75%
	Hasil	Persentase Peningkatan kelembagaan kelompok tani	10%	12%

Efisiensi diperoleh dari perbandingan antara realisasi *ouput* dengan realisasi *input*, terutama komponen dana dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut *efisien* jika realisasi *output* sama atau melebihi target, sedangkan realisasi dana sama atau lebih rendah dari target, sedangkan *inefisien* disebabkan realisasi *output* lebih rendah dari target, sementara realisasi dana sama atau lebih besar dari target.

Efektifitas adalah perbandingan antara *ratio* pencapaian *outcome* dengan *ratio* pencapaian *output* dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut *efektif* jika pencapaian *outcome* sama, melebihi target atau seimbang dengan pencapaian *output*, sedangkan *in-efektif* disebabkan pencapaian *outcome l*ebih rendah daripada pencapaian *output*.

Dari hasil analisis efisiensi dan efektifitas diperoleh kesimpulan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan prioritas di dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebanyak (Sepuluh) kegiatan sudah dilaksanakan dengan predikat kinerja "**SANGAT BAIK"** karena seluruh kegiatan berkatagori "**EFISIEN DAN EFEKTIF"** atau **100 %**

3. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2023

Secara rinci, realisasi belanja langsung yang terdiri dari Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam pada tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.16 Realisasi Fisik Dan Keuangan Progam dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Batam

TAHUN 2023

NO	UNIT KERJA / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	ALOKASI ANGGARAN	TARGET		REALISASI				SISA ANGGARAN
						(RP)	(%)	KEUANGAN		FISIK		
								Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			13.764.104.372,00	13.764.104.372,00	13.764.104.372,00	100,00%	12.882.763.939,00	93,60%	12.978.134.967,00	94,29%	881.340.433,00
1	2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			9.919.735.572,00	9.919.735.572,00	9.919.735.572,00	100,00%	9.534.635.344,00	96,12%	9.610.997.853,00	96,89%	385.100.228,00
		2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat		7.859.852.592,00	7.859.852.592,00	7.859.852.592,00	100,00%	7.650.851.577,00	97,34%	7.682.887.489,00	97,75%	209.001.015,00
			2.09.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.799.392.592,00	7.799.392.592,00	7.799.392.592,00	100,00%	7.590.991.577,00	97,33%	7.623.027.489,00	97,74%	208.401.015,00
			2.09.01.2.02.03 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.460.000,00	60.460.000,00	60.460.000,00	100,00%	59.860.000,00	99,01%	59.860.000,00	99,01%	600.000,00
		2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat		297.767.500,00	297.767.500,00	297.767.500,00	100,00%	195.239.459,00	65,57%	195.662.959,00	65,71%	102.528.041,00
			2.09.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.210.000,00	6.210.000,00	6.210.000,00	100,00%	5.898.250,00	94,98%	5.898.250,00	94,98%	311.750,00
			2.09.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104.686.000,00	104.686.000,00	104.686.000,00	100,00%	92.564.450,00	88,42%	92.564.450,00	88,42%	12.121.550,00
			2.09.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.212.500,00	11.212.500,00	11.212.500,00	100,00%	10.319.000,00	92,03%	10.742.500,00	95,81%	893.500,00
			2.09.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00%	3.600.000,00	100,00%	3.600.000,00	100,00%	0,00
			2.09.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172.059.000,00	172.059.000,00	172.059.000,00	100,00%	82.857.759,00	48,16%	82.857.759,00	48,16%	89.201.241,00
		2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		1.580.655.480,00	1.580.655.480,00	1.580.655.480,00	100,00%	1.518.567.608,00	96,07%	1.562.440.705,00	98,85%	62.087.872,00
			2.09.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	258.965.000,00	258.965.000,00	258.965.000,00	100,00%	212.438.303,00	82,03%	245.061.449,00	94,63%	46.526.697,00
			2.09.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.321.690.480,00	1.321.690.480,00	1.321.690.480,00	100,00%	1.306.129.305,00	98,82%	1.317.379.256,00	99,67%	15.561.175,00
		2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah		181.460.000,00	181.460.000,00	181.460.000,00	100,00%	169.976.700,00	93,67%	170.006.700,00	93,69%	11.483.300,00
			2.09.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.930.000,00	120.930.000,00	120.930.000,00	100,00%	114.706.700,00	94,85%	114.706.700,00	94,85%	6.223.300,00
			2.09.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.450.000,00	24.450.000,00	24.450.000,00	100,00%	20.895.000,00	85,46%	20.895.000,00	85,46%	3.555.000,00
			2.09.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.080.000,00	36.080.000,00	36.080.000,00	100,00%	34.375.000,00	95,27%	34.405.000,00	95,36%	1.705.000,00

2	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN			1.442.532.000,00	1.442.532.000,00	1.442.532.000,00	100,00%	1.215.223.500,00	84,24%	1.215.223.500,00	84,24%	227.308.500,00
		2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan		141.400.000,00	141.400.000,00	141.400.000,00	100,00%	111.120.200,00	78,59%	111.120.200,00	78,59%	30.279.800,00
			2.09.03.2.02.03 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	141.400.000,00	141.400.000,00	141.400.000,00	100,00%	111.120.200,00	78,59%	111.120.200,00	78,59%	30.279.800,00
		2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target		1.301.132.000,00	1.301.132.000,00	1.301.132.000,00	100,00%	1.104.103.300,00	84,86%	1.104.103.300,00	84,86%	197.028.700,00
			2.09.03.2.04.02 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.301.132.000,00	1.301.132.000,00	1.301.132.000,00	100,00%	1.104.103.300,00	84,86%	1.104.103.300,00	84,86%	197.028.700,00
3	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			35.930.000,00	35.930.000,00	35.930.000,00	100,00%	15.727.000,00	43,77%	15.727.000,00	43,77%	20.203.000,00
		2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan		35.930.000,00	35.930.000,00	35.930.000,00	100,00%	15.727.000,00	43,77%	15.727.000,00	43,77%	20.203.000,00
			2.09.04.2.02.02 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.930.000,00	35.930.000,00	35.930.000,00	100,00%	15.727.000,00	43,77%	15.727.000,00	43,77%	20.203.000,00
4	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			75.963.000,00	75.963.000,00	75.963.000,00	100,00%	75.486.000,00	99,37%	75.486.000,00	99,37%	477.000,00
		2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan		75.963.000,00	75.963.000,00	75.963.000,00	100,00%	75.486.000,00	99,37%	75.486.000,00	99,37%	477.000,00
			2.09.05.2.01.02 - Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	75.963.000,00	75.963.000,00	75.963.000,00	100,00%	75.486.000,00	99,37%	75.486.000,00	99,37%	477.000,00
5	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN			654.145.000,00	654.145.000,00	654.145.000,00	100,00%	588.603.784,00	89,98%	588.603.784,00	89,98%	65.541.216,00
		3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana		654.145.000,00	654.145.000,00	654.145.000,00	100,00%	588.603.784,00	89,98%	588.603.784,00	89,98%	65.541.216,00
			3.27.02.2.01.02 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	654.145.000,00	654.145.000,00	654.145.000,00	100,00%	588.603.784,00	89,98%	588.603.784,00	89,98%	65.541.216,00
6	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN			534.627.500,00	534.627.500,00	534.627.500,00	100,00%	512.750.290,00	95,91%	516.054.800,00	96,53%	21.877.210,00
		3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian		534.627.500,00	534.627.500,00	534.627.500,00	100,00%	512.750.290,00	95,91%	516.054.800,00	96,53%	21.877.210,00
			3.27.03.2.02.07 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	534.627.500,00	534.627.500,00	534.627.500,00	100,00%	512.750.290,00	95,91%	516.054.800,00	96,53%	21.877.210,00
7	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN			1.022.617.300,00	1.022.617.300,00	1.022.617.300,00	100,00%	863.083.821,00	84,40%	878.787.830,00	85,94%	159.533.479,00
		3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan,		147.270.000,00	147.270.000,00	147.270.000,00	100,00%	52.820.000,00	35,87%	52.820.000,00	35,87%	94.450.000,00
			3.27.04.2.01.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	147.270.000,00	147.270.000,00	147.270.000,00	100,00%	52.820.000,00	35,87%	52.820.000,00	35,87%	94.450.000,00
		3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa		875.347.300,00	875.347.300,00	875.347.300,00	100,00%	810.263.821,00	92,56%	825.967.830,00	94,36%	65.083.479,00
			3.27.04.2.03.01 - Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	450.310.050,00	450.310.050,00	450.310.050,00	100,00%	447.929.500,00	99,47%	450.310.050,00	100,00%	2.380.550,00
			3.27.04.2.03.02 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	425.037.250,00	425.037.250,00	425.037.250,00	100,00%	362.334.321,00	85,25%	375.657.780,00	88,38%	62.702.929,00
8	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			78.554.000,00	78.554.000,00	78.554.000,00	100,00%	77.254.200,00	98,35%	77.254.200,00	98,35%	1.299.800,00
		3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		78.554.000,00	78.554.000,00	78.554.000,00	100,00%	77.254.200,00	98,35%	77.254.200,00	98,35%	1.299.800,00
			3.27.07.2.01.01 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00%	11.444.800,00	99,52%	11.444.800,00	99,52%	55.200,00
			3.27.07.2.01.02 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	67.054.000,00	67.054.000,00	67.054.000,00	100,00%	65.809.400,00	98,14%	65.809.400,00	98,14%	1.244.600,00
			TOTAL	13.764.104.372,00	13.764.104.372,00	13.764.104.372,00	100,00%	12.882.763.939,00	93,60%	12.978.134.967,00	94,29%	881.340.433,00

BAB IV

TINDAK LANJUT LHE LAKJIP TAHUN 2023

Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) LAKJIP 2023 berdasarkan surat Inspektorat daerah Kota Batam No 34/INSP-BTM/LHE-SAKIP/V/2023 tentang laporan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian tahun 2023 dan tindak lanjut yang sudah dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam sepanjang tahun 2023 sebagai berikut:

1	Rekomendasi	:	Menyusun kebijakan kepala OPD dan SOP terkait penyusunan dokumen perencanan kinerja, pengukuran kinerja, penyusunan laporan kinerja dan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja intenal.
	Tindak lanjut	:	Kepala Dinas telah menyusun kebijakan dan SOP terkait penyusunan dokumen perencanan kinerja, pengukuran kinerja, penyusunan laporan kinerja dan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja intenal.
2	Rekomendasi	:	Menggunakan hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dalam melakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja
	Tindak lanjut	:	Kepala Dinas telah menggunakan hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dalam melakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja
3	Rekomendasi	:	Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengumpulan data kinerja, pengukuran capaian kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal
	Tindak lanjut	:	Kepala Dinas telah menggunakan teknologi informasi dalam pengumpulan data kinerja, pengukuran capaian kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal
4	Rekomendasi	:	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam penyesuaian organisasi serta dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional
	Tindak lanjut	:	Kepala Dinas telah melakukan menyajikan realisasi tahun berjalan dibandingkan target jangka menegah tapi juga realisasi tahun berjalan dibandingkan standar nasional.
5	Rekomendasi	:	Melakukan review berjenjang terhadap Laporan Kinerja sebelum diformalkan
	Tindak lanjut	:	Kepala Dinas telah melakukan review berjenjang terhadap Laporan Kinerja
6	Rekomendasi	:	Memanfaatkan informasi di dalam Lampiran Kinerja dalam penyesuaian aktivitas, penyesuaian anggaran, perencanaan kinerja berikutnya, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dan perubahan budaya kinerja organisasi
	Tindak lanjut	:	Kepala Dinas telah memanfaatkan informasi di dalam Lampiran Kinerja dalam penyesuaian aktivitas, penyesuaian anggaran, perencanaan kinerja berikutnya, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dan perubahan budaya kinerja organisasi
7	Rekomendasi	:	Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai upaya peningkatan implementasi SAKIP di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.
	Tindak lanjut	:	Kepala Dinas telah melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai upaya peningkatan implementasi SAKIP di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.
8	Rekomendasi	:	Memanfaatkan IKU dalam penilaian kinerja, perencanaan dan penganggaran kegiatan.
	Tindak lanjut	:	Kepala Dinas telah memanfaatkan IKU dalam penilaian kinerja, perencanaan dan penganggaran kegiatan.

BAB V
PENUTUP

LAKJIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dalam pencapaian visi, misi dan sasaran strategis, serta disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tantang Perecepatan Pemberantasan Korupsi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Secara umum pelaksanaan kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam merupakan penjabaran dari Sasaran dan Program Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, baik Pencapaian Kinerja Sasaran, telah terlaksana cukup baik dan lancer.

Pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam pada Tahun 2023 diselenggarakan dalam 4 (empat) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja, yang walaupun penuh dengan berbagai hambatan dan tantangan namun tetap dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam pencapain kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam tersebut terdapat beberapa indikator kinerja yang dapat memenuhi target atau sesuai dengan rencana, ada yang dapat melampaui target, namun ada pula yang belum dapat memenuhi target tapi masih dengan katogori **Sangat Tinggi .**

Target kinerja tersebut perlu dievaluasi pencapaiannya, sehingga apabila terdapat hal-hal yang dianggap dapat mengakibatkan tidak tercapainya target, dapat secara dini dibuat langkah-langkah strategis yang mengarah tercapainya target. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mengatasi masalah/hambatan serupa di tahun yang akan datang, telah

dirumuskann beberapa strategis yang dapat dilakukan, terutama terhadap indikator kinerja yang belum memenuhi target. Namun diharapkan LKIJP dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan Perencanaan Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.

Dengan demikian, LAKJIP dapat dijadikan pendorong untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, serta dengan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.